

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASIA TIMUR
DI BAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional*

**Disusun Oleh:
MUCHTAR MUIN
E 131 06 059**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASIA
TIMUR DI BAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE

N A M A : MUCHTAR MUIN

N I M : E 131 06 059

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, Desember 2013

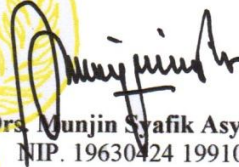
Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 19611012 198701 1 001



Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 19630424 199103 1 002

Mengesahkan :
Ketua Jurusan,



Dr. H. Adi Suryadi B., MA
NIP. 19630217 199202 1 001

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASIA
TIMUR DI BAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE

N A M A : MUCHTAR MUIN

N I M : E 131 06 059

JURUSAN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 31 Desember 2013

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Drs. H. Husain Abdullah, M.Si

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si



Patrice Lumumba
Muh. Ashry Sallatu
Munjin Syafik Asy'ari
Husain Abdullah
Burhanuddin

ABSTRAKSI

Muchtar Muin, E13106059, “Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang di Asia Timur di Bawah Pemerintahan Shinzo Abe”, di bawah bimbingan Bapak Patrice Lumumba selaku Pembimbing I, dan Bapak Munjin Syafik Asy’ari selaku Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan luar negeri Jepang di Asia Timur di Bawah Pemerintahan Shinzo Abe. Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada dua pokok permasalahan, yaitu: (1) Peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang, dan (2) Penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kepulauan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian berdasarkan tempat penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode telaah pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, baik berupa jurnal, buku, dokumen, surat kabar, serta beberapa situs internet yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa yang bersifat kualitatif. Data yang relevan dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta yang ada antara satu dengan lainnya untuk menarik kesimpulan akhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur, khususnya di bawah pemerintahan Shinzo Abe, merupakan tindakan dalam memaknai dinamika politik dan keamanan di kawasan, yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pertahanan dalam menjaga keamanan nasional Jepang, serta penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kedaulatan di perairan laut lepas, dengan RRC dan Korea Selatan. Dalam upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan Jepang, pemerintahan Shinzo Abe menerapkan kebijakan menaikkan anggaran pertahanan Jepang, mengembangkan industri pertahanan, mengembangkan sistem pertahanan senjata balistik, memperkuat postur pertahanan di kepulauan barat daya, mempertahankan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, serta menjalin kerjasama pertahanan berlapis dengan negara-negara Asia-Pasifik. Dalam menyelesaikan masalah sengketa kepulauan Senkaku, pemerintahan Shinzo Abe lebih menempuh kebijakan garis keras melalui konfrontasi militer dengan RRC, sedangkan penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ditempuh melalui jalur diplomasi dengan Korea Selatan.

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya (QS. Ar-Ra'd: 11).

Maka nikmat dari Tuhanmu hendaklah kamu ceritakan (QS. Ad-Dhuha: 11).

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada hamba, khususnya waktu. Untuk itu, sebagai wujud rasa syukur hamba kepada-Nya, hamba senantiasa mengisinya dengan beribadah, berpikir, bekerja, berkarya, dan hidup lebih berkualitas. Semoga dengan rampungnya skripsi ini, hamba semakin sadar bahwa setiap detik adalah anugerah, takdir, dan nikmat dari-Mu yang tak boleh hamba sia-siakan.

Saya memasuki kampus hari itu dengan niat, tekad, dan ketetapan hati, untuk selesai tepat waktu. Untuk itu, mulailah saya aktif memasuki bilik kuliah sesuai jadwal. Di tahun-tahun awal, memang mudah dan menyenangkan, namun ketika memasuki semester-semester akhir perkuliahan, saya mulai galau. Empat tahun yang lalu, saya adalah seorang pencari ilmu yang kurang sabar, dan tak pernah berpuas diri. berpindah-pindah dari beragam aktivitas, saya melayani hasrat keingintahuan saya untuk mencicipi berbagai ragam kegiatan baru. Saya loncat-loncat dari satu pengkaderan organisasi ke organisasi lainnya, menjadi peserta terbaik, menjadi kader, dan bahkan diberi amanah menduduki kursi ketua.

Di tengah kesibukan beragam aktivitas, saya larut dengan waktu. Saat semua mahasiswa antusias menikmati musim skripsi, saya malah mengabaikannya. Saya lebih memilih menikmati aktivitas yang waktu itu terasa lebih menantang: belajar menulis untuk konsumsi khalayak, belajar meneliti disiplin ilmu sosial dan ilmu politik, ikut pelatihan *leadership* dan *lifeskill*, dan aktif berdiskusi keliling nusantara dengan kalangan kampus dan luar kampus di beberapa kota di Indonesia.

Hingga tibalah waktunya, saya terpanggil, dan bahkan dipanggil untuk segera merapat ke kampus yang sudah sangat nyaman, rindang, dan 'aduhai'. Sepucuk kertas di dinding jurusan tertera namaku dengan anggunnya bersama beberapa teman angkatan, untuk segera 'bersih-bersih dari kampus'. Kertas peringatan dari Yang Mulia Rektor Unhas itu, ibarat lampu kuning bagi kami. Saya pun bergegas mulai menyusun proposal!

KISAH PENULISAN

Setelah membaca dengan seksama kertas peringatan itu, dan dengan diiringi do'a dan kata-kata penyemangat dari Bunda Naharia, dan juga Kak Rahma, serta perhatian Pak Aspiannor, dan orang-orang dekat saya, saya pun mulai menyusun proposal saya. Alhamdulillah, saya pun dapat bimbingan intens dari pembimbing hebat saya: Bapak Patrice Lumumba selaku pembimbing I, dan Bapak Munjin Syafik Asy'ari selaku

pembimbing II. Dari merekalah, proposal saya berhasil diujikan dan layak dilanjutkan ketahapan penelitian.

Sesudah berhasilnya ujian proposal saya, saya pun bertekad untuk menyusun skripsi ini secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tujuh hari penelitian, bulan Delapan, bertepatan Ramadhan, itu sudah cukup, dan insya Allah, akan mudah dilewati. Namun, ibarat pepatah, sepandai-pandainya mahasiswa berencana, kemalasan jualah yang menentukan. Saya sempat melakukan pembiaran beberapa minggu, karena tergoda oleh rutinitas lain yang lebih mengasikkan. Selain itu, saya juga mengalami kemacetan menulis, dan kekusutan berpikir. Hingga akhirnya, rencana 'tuk ikut menyanyikan lagu 'Godeamus Igitus' di Hari Ulang Tahun Unhas pun gagal total. Tidak hanya itu, Angka Harapan Hidup saya di kampus pun semakin mendekati akhir.

Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Naskah Skripsi saya, beserta beberapa lembaran kertas penting sebagai syarat-syarat kelayakan Ujian Meja mendapati jalan dari Rektorat untuk disidangkan. Bertepatan 31 Desember 2013, detik-detik yang menentukan, di hari terakhir dan paling akhir masa studi, menjelang tutup tahun, saya berhasil melewati Sidang Ujian Komprehensif, dan divonis Lulus. Alhamdulillah, akhirnya saya pun benar-benar berhasil menyelesaikan studi tepat waktu: selama 6 tahun, 11 bulan, 30 hari, dan plus beberapa hari tambahannya. Sebuah penantian panjang bagi kedua orang tua dan keluargaku, serta perjuangan panjang bagiku, untuk mendapatkan supremasi gelar kebangsawanan pendidikan tinggi: Sarjana Ilmu Politik (S.IP) dari negara.

PERSEMBAHAN

Akhirnya, saya ingin menutup pengantar ini dengan semacam persembahan. Ada dua orang yang paling layak saya sebut pertama dan terutama, Ayah dan Ibu saya. Mereka berdua berjuang sangat keras, di tengah keterbatasan ekonomi kami, untuk menyokong penyelesaian studi Strata Satu saya. Sayangnya, saya telah membuatnya menunggu agak lama.

Selama penyusunan naskah skripsi ini, saya ditemani baik oleh sahabat-sahabat terdekat saya: Andy Arya Maulana (Solo), Rahmayandi Mulda (Yogya), Bacharuddin Aziz Kusuma (Jakarta), Rahman Dillah & Zainuddin (Makassar), juga Rina Rahmatia Ridwan & Yuyu Sandra Yudi atas kebersamaannya menulis naskah skripsi di Perpustakaan Unhas.

Secara khusus, terima kasih saya ucapkan kepada Pertamina Foundation atas dukungan materil selama setahun menerima beasiswa. Ayahanda Nasaruddin Salam, yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materil di setiap kegiatan yang saya ikuti atas nama Unhas. Juga tak lupa kepada Bapak Mursalim, selaku penanggungjawab Asrama Mahasiswa, yang telah memberi hunian nyaman selama hampir tiga tahun kepada saya. Tak terkecuali, dosen-dosen kami yang hebat: Dr. Adi Suryadi, Dr. Nasir Badu, Pak Husain Abdullah, Pak Darwis, Prof. Paembonan, Prof. Mappa Nasrun, Prof. Salussu, Ibu

Puspa, Ibu Isda, Pak Asri Sallatu, dan Pak Burhanuddin, terima kasih atas didikan, ilmu, pengetahuan, dan semangat belajar yang diberikan.

Kepada Bunda Tatty dan Pak De Elmir beserta teman-teman Forum Indonesia Muda (FIM) yang super, terima kasih atas kesempatan, ilmu, pengalaman, dan kebersamaannya dalam keluarga kunang-kunang tumpuan nurani penjaga negeri. Terima kasih kepada Bapak Amien Rais, Dien Samsuddin, Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Houtman Zainal Arifin, Muchtar Naim, Dedy Panigoro, Bunda Meutia Hatta, Bunda Farida Patittingi, dan Mario Teguh atas segala motivasi, bimbingan, teladan, kisah sukses, dan karakter yang dicontohkan.

Kepada kakanda Muh. Syukri Hasyim, Holid Alamsyah, Rahmatullah, Anifah, Ade Irzal Nakoe, Ahmad Abdi Amsir, Ramen, Hadisra, Abdul Rahmat Noer, Sulaeman Gossalam, Haidir Fitra Siagian, dan Yusnaeni, terima kasih atas dorongan, dukungan, saran, ilmu, dan kebersamaannya selama ini.

Saya tentu tak akan pernah melupakan jasa baik, kebersamaan, kekeluargaan, dan harapan bagi masa depan bangsa Indonesia dari teman-teman saya: Muh. Ridwan Zain, Mawardin, Soedarman Husaeni, Mautullah, Pandu Prayoga, Musniar Nasruddin, Imtihana Fitria, Rosdi Bin Ladorang, Sitti Marwah, Nelly Fadrianis, Nasruddin Launtu, Amaltea F. Firdauzi, Naimah Lutfi (UI), Maula (UNJ), Atikah Surriani (Unila), Bella Moulina (Unjam), Elias Sawaki (Uncen), Tazkia Fatimah (Undip), Yetty Yudiyanti (UNY), Siti Lutfiyah Aziza (IPB), Rina Maysarah Siregar (Aceh), dan Stella Clarisa (Unpar).

Saya juga berterima kasih kepada Kakanda Fajlurrahman Jurdi dan kawan-kawan dari IMM yang telah memberi banyak kesempatan belajar dan memimpin. Mereka telah sangat sabar menunggu saya, yang senang bermanja-manja dengan waktu dan ketidakdisiplinan.

Pembaca yang budiman, selamat membaca karya saya!

Makassar, Desember 2013
MUCHTAR MUIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Konsep Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri	19
B. Konsep Tentang Kawasan dan Regionalisme	26
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DAN KAWASAN ASIA TIMUR	32
A. Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang	32
1. Dasar Kebijakan	32
2. Tujuan Kebijakan	37
3. Sasaran Kebijakan	41
B. Kawasan Asia Timur	45
1. Arti Penting Kawasan	45
2. Masalah-masalah Kawasan	48
BAB IV WUJUD KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASIA TIMUR DI BAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE	53
A. Peningkatan Kapabilitas Pertahanan	53
B. Penyelesaian Sengketa-sengketa Wilayah	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai Jepang dan kawasan Asia Timur menjadi objek kajian menarik, bagi penstudi Hubungan Internasional dalam satu dasawarsa terakhir. Beberapa permasalahan mengenai politik, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, sedang dihadapi Jepang. Jepang mengalami inflasi ekonomi, skandal politik, fluktuasi kepemimpinan, dilema keamanan di tengah krisis Semenanjung Korea, sengketa kepemilikan wilayah kepulauan di Laut Cina Timur dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Korea Selatan, serta adanya keinginan kuat Jepang untuk membangun kembali kekuatan militernya, yang selama ini bergantung pada Amerika Serikat, dan mencermati dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur, menjadi objek kajian yang menarik untuk ditelaah.

Perkembangan terkini yang sangat menarik dari Jepang adalah suksesi pemilihan umum (pemilu), yang berlangsung pada akhir 2012. Perubahan kekuasaan dalam pemerintahan Jepang ini, akan berimplikasi pada kebijakan ekonomi, stabilitas politik dalam negeri, serta arah kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Jepang, khususnya di kawasan Asia Timur. Pada pemilu yang dilaksanakan pada Desember 2012, *Liberal Democratic Party* (LDP) dan ketuanya, Shinzo Abe, memenangi pemilu Parlemen dan Perdana Menteri Jepang.

Partai LDP, partai yang telah lama berkuasa di Jepang, namun kehilangan pamor selama tiga tahun terakhir, berhasil memenangi mayoritas kursi Parlemen, dan bersama Partai Komeito sebagai mitra koalisi pemerintahan, membentuk kabinet di bawah kepemimpinan Shinzo Abe. LDP mengusung mantan perdana menteri Jepang periode 2006-2007, Shinzo Abe, yang kini menjabat ketua partai tersebut, untuk kembali berkuasa. Shinzo Abe terpilih sebagai perdana menteri baru Jepang di Parlemen Majelis Rendah, pada 26 Desember 2012, setelah berhasil mengalahkan lawannya, Yoshihiko Noda dari partai yang berkuasa saat ini, *Democratic Party of Japan (DPJ)*. Dari laporan jurnalis *The New York Times*, Shinzo Abe memenangkan dukungan 328 anggota dari 480 kursi Majelis Rendah.¹ Kemenangan tersebut, menempatkan kembali Shinzo Abe, dan LDP, di pucuk pemerintahan Jepang.

Sebelumnya, Shinzo Abe pernah menjabat perdana menteri Jepang pada 2006-2007 lalu. Namun pada akhir 2007, ia mengundurkan diri dari jabatannya, setelah partainya LDP, mengalami kekalahan telak pada pemilihan Majelis Tinggi, Juli 2007. Meski alasan dalam pengunduran dirinya karena faktor kesehatan, namun banyak kalangan menilai, bahwa ia tak cakap memimpin partai dan pemerintahannya. Pemerintahannya pun ditandai, dengan serangkaian skandal politik yang melibatkan anggota kabinetnya, termasuk bunuh diri Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Matsuoka Toshikatsu, atas masalah politik uang. Kesulitan Shinzo Abe itu, diperparah oleh fakta, bahwa ia menghadapi ketimpangan di Parlemen, dimana Majelis Tinggi,

¹ Martin Fackler. (2012). *Ex-Premier is Chosen to Govern Japan Again*. http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html?_r=0. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.39 WITA.

berada di tangan oposisi, dengan Ichiro Ozawa dari DPJ, sebagai pimpinan Parlemen, membuat sesulit yang dia bisa.²

Munculnya kembali nama Shinzo Abe pada pemilu 2012, menjadi kejutan sekaligus harapan, bagi banyak kalangan politisi, ekonom, hingga masyarakat Jepang. Nama Shinzo Abe mencuat kembali sejak September 2012, setelah berhasil mengalahkan mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba, untuk menjadi ketua oposisi di Parlemen. Sejak saat itu, namanya kian berkibar, karena rakyat Jepang yang kembali bergeser ke kanan, merasa tak puas dengan kinerja Perdana Menteri Yoshihiko Noda, dan dua perdana menteri sebelumnya dari DPJ. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh partai oposisi LDP, untuk mengambil alih kembali simpati rakyat Jepang agar mendukung LDP dan Shinzo Abe dalam pemilu Parlemen dan Perdana Menteri Jepang. Hasilnya, kemenangan telak diraih LDP, yang akhirnya, menguasai kembali mayoritas kursi di Parlemen, dan Shinzo Abe pun, kembali menduduki kursi Perdana Menteri Jepang untuk kali keduanya.

Kemenangan Shinzo Abe tidak bisa dilepaskan dari menurunnya citra DPJ di mata rakyat Jepang. Menurut analisa Ikrar Nusa Bhakti, seorang analis hubungan internasional LIPI, di mata rakyat, tiga tahun sudah DPJ diberi kesempatan mengubah wajah Jepang, yang terlalu lama di bawah LDP. Namun, baik Perdana Menteri Yukio Hatoyama (2009-2010), Naoto Kan (2010-2011), dan Yoshihiko Noda (2011-2012), tak terlalu menjanjikan harapan rakyat Jepang. Dalam bidang ekonomi, Jepang tetap tak mampu menyaingi RRC, malahan ekonomi Jepang tetap sekarat, setelah diterpa musibah tsunami, dan kebocoran reaktor nuklir Fukushima Daichi. Dalam hubungan internasional,

² Aurelia George Mulgan. (2012). *What an Abe Prime Ministership Would Mean for Japan*. <http://www.eastasiaforum.org/2012/10/01/what-an-abe-prime-ministership-would-mean-for-japan/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.32 WITA.

Jepang dipandang terlalu lembek terhadap negara tetangga RRC dan Korea Selatan, terkait masalah “luka lama” agresi Kekaisaran Jepang, dan sengketa kepemilikan kepulauan laut lepas di Laut Cina Timur. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Jepang tak mampu memainkan peran signifikan, dalam meredam perkembangan program nuklir Korea Utara.³

Shinzo Abe memenangi pemilu karena memiliki konsep kebijakan yang menarik simpati rakyat Jepang, khususnya dalam pemulihan ekonomi, yang lebih dikenal dengan istilah *Abenomic*. Selain itu, ia juga dipilih, karena memiliki kepribadian politik yang karismatik, patriotik, tegas, dan berani, utamanya dalam hal pengambilan keputusan, terkait penyelesaian masalah ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri dengan negara-negara tetangga di Asia Timur. Pengalaman kepemimpinan Shinzo Abe pada periode sebelumnya, yang dinilai cukup mengesankan, walau dalam waktu yang singkat, menjadi salah satu acuan rakyat Jepang, memilih Shinzo Abe daripada Yoshihiko Noda, sebagai perdana menteri Jepang.

Terpilihnya Shinzo Abe sebagai perdana menteri baru Jepang, seakan melengkapi perubahan kekuasaan politik, di negara-negara Asia Timur, yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Selain Jepang, perubahan kekuasaan politik juga terjadi di Korea Utara, di bawah kendali Kim Jong-un, dan di RRC, yang kini berada di bawah komando Xi Jinping. Sementara itu, Korea Selatan memilih Park Geun-hye, sebagai presiden wanita pertama yang memimpin Korea Selatan.

³ Ikrar Nusa Bhakti. “Asia Timur Setelah Pemilu Jepang”. Kompas, 5 Januari 2013. Hal. 7.

Dari keempat peristiwa pergantian kepemimpinan tersebut, yang menarik, terpilihnya kembali Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang, menyiratkan kekhawatiran di luar Jepang, akan arah politik luar negeri Jepang di Asia Timur. Terpilihnya Shinzo Abe di saat-saat krisis keamanan dan politik di Asia Timur, menimbulkan berbagai reaksi di luar Jepang, terutama mengenai sikapnya yang nasionalistik dan revisionis. Sosok Shinzo Abe dikenal sebagai pribadi nasionalis dan fundamentalis. Ia juga dianggap sebagai pelindung gerakan revisionis sejarah Jepang.

Sekedar sebagai gambaran, prioritas kebijakan Shinzo Abe ketika menjadi perdana menteri Jepang pada periode 2006-2007 lalu, dalam analisa Aurelia George Mulgan, seorang analis politik luar negeri pada *New South Wales University*, memberikan beberapa petunjuk seperti apa prioritas kebijakannya ke depan, dan dampaknya bagi negara-negara Asia Timur. Saat menjabat, dia memiliki fokus merevisi konstitusi, mempelajari pilihan pertahanan kolektif, melahirkan patriotisme yang lebih besar di antara anak-anak sekolah, meningkatkan anggaran pertahanan dan status Badan Pertahanan Jepang, dan mengisyaratkan mendorong perdebatan, tentang status kepemilikan senjata nuklir bagi Jepang.⁴

Gambaran kebijakan-kebijakan inilah yang dikhawatirkan oleh negara-negara tetangga, khususnya RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara, tiga negara korban agresi Kekaisaran Jepang, mengenai kebijakan politik luar negeri Jepang, yang akan menjadi semakin nasionalistik di bawah kepemimpinan Shinzo Abe. Sikap ekspansionisme militer

⁴ Aurelia George Mulgan. *Loc Cit.*

Jepang pada masa Perang Dunia, dan berbagai kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan, telah menjadi faktor utama kekhawatiran negara-negara tersebut.

Indikasi ketidaknyamanan RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara terhadap figur Shinzo Abe, dibuktikan melalui tindakan menjelang pemilihan perdana menteri Jepang. Pemerintah RRC menerbangkan pesawat patroli kelautan Y-12 memasuki wilayah udara Kepulauan Senkaku/Diaoyu, yang disengketakan kedua negara, 13 Desember 2012 lalu. Insiden tersebut terjadi, bertepatan dengan peringatan 75 tahun tragedi “Pembantaian Nanjing” yang dilakukan militer Jepang di RRC, 13 Desember 1937.⁵ Pemerintah Korea Selatan juga menggugat Jepang atas klaim kepemilikan wilayah kepulauan Takeshima/Dokdo. Sedangkan Korea Utara, berhasil meluncurkan roket jarak jauh, Unha-3, yang berhasil mengorbitkan satelit Kwangmysong-3, 12 Desember 2012 lalu, yang dipandang berpotensi mengancam stabilitas keamanan Asia Timur.⁶ Tindakan ketiga negara tetangga Jepang tersebut, semakin memperburuk hubungan bilateral mereka dengan Jepang. Namun, langkah ini juga bisa dilihat, sebagai provokatif oleh RRC, Korea Selatan dan Korea Utara, tiga korban Jepang dalam Perang Dunia II era kebijakan militeristik. Sepertinya, tindakan tersebut, sebagai bentuk propaganda, agar rakyat Jepang, tidak menjatuhkan pilihan kepada Shinzo Abe.

Kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan, serta perubahan kekuasaan politik di Asia Timur, akan turut mempengaruhi dinamika politik dan keamanan, serta perubahan geostrategik, yang akan berdampak luas dan mendalam, bagi kepentingan

⁵ Kompas (ed.). “*Sengketa Wilayah: Delapan F-15 Jepang Cegat Pesawat China*”. Kompas, 14 Desember 2012. Hal. 8.

⁶ Rene L. Pattiradjawane. “*Roket Korut dan Perubahan Radikal di Asia*”. Kompas, 15 Desember 2012. Hal. 8.

nasional, dan kebijakan politik luar negeri, negara-negara di kawasan ini. Politik luar negeri suatu negara, pada hakikatnya, merupakan hasil perpaduan dan refleksi, dari kondisi dalam negeri, yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Jepang, tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal, yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Faktor internal Jepang dipengaruhi oleh persoalan ketidakstabilan politik dalam negeri Jepang. Selama kurun waktu 2006-2012, politik dan pemerintahan di Jepang amat tidak stabil. Di pucuk pimpinan, setiap tahun perdana menteri diganti. Sementara di Parlemen, terjadi silang pendapat dan perbedaan pandangan antara LDP dengan DPJ, dua partai mayoritas di Parlemen.

Kondisi ini bermula dari kekalahan mendadak LDP pada pemilu di Majelis Tinggi, sehingga berdampak pada pengunduran diri Shinzo Abe. Dua penerusnya kemudian dari LDP, Yasuo Fukuda (2007-2008), dan Taro Aso (2008-2009), tak mampu mengubah keadaan. Mereka memimpin Jepang di lembaga eksekutif, namun menjadi partai minoritas di bawah DPJ di Parlemen, sehingga tak memperoleh dukungan mayoritas di setiap kebijakan. Puncaknya, pada pemilu 2009, LDP mengalami kekalahan telak, sehingga posisi perdana menteri berada dibawah kendali DPJ untuk kali pertama.⁷

Namun, baik Yukio Hatoyama (2009-2010), Naoto Kan (2010-2011), dan Yoshihiko Noda (2011-2012), tiga perdana menteri Jepang dari DPJ, tak berhasil membawa perubahan fundamental dalam politik dan ekonomi Jepang. Malahan, dalam analisa Kojima Akira, anggota senior pada *The Japan Center for Economic Research*,

⁷ Taniguchi Masaki, Uenohara Hideaki & Sakaiya Shiro. (2010). *Who Ended the LDP's Reign?* Japan Echo, Volume 37, Nomor 1, Februari 2010. Hal. 21-22.

perekonomian Jepang mengalami kemerosotan tajam dalam sejarah, akibat ketidakstabilan politik dalam negeri, yang kian diperparah oleh krisis finansial global pada 2009, yang mengakibatkan posisi Jepang, yang selama ini berada di rangking kedua dalam perekonomian dunia, berhasil diambil alih oleh RRC, yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan.⁸ Kondisi ini tentu saja mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri Jepang, yang berdampak pada ketidakstabilan arah politik luar negeri Jepang.

Munculnya RRC sebagai kekuatan adidaya ekonomi dan militer di kawasan, dan semakin pesatnya kemajuan program nuklir Korea Utara, yang dibarengi dengan pagelaran latihan militer bersama, antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Jepang, yang memandang masalah ini sebagai ancaman utama, yang tidak hanya mengancam keamanan nasional Jepang, namun juga mengganggu perdamaian dan stabilitas politik di kawasan Asia Timur. Selain itu, ketegangan di Laut Cina Timur dengan RRC, terkait status kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu, serta sengketa kepulauan Takeshima/Dokdo dengan Korea Selatan, merupakan faktor internasional, yang menjadi persoalan utama Jepang.

Kondisi ini telah memaksa Jepang, untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Di satu sisi, perubahan ini merupakan hak prerogatif Jepang, dalam melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya. Namun di sisi lain, akan menimbulkan berbagai kecurigaan dari negara-negara tetangganya. Tentu saja, perubahan kebijakan ini, akan berimplikasi terhadap kawasan Asia Timur, dimana Jepang memiliki

⁸ Kojima Akira. (2009). *Japan as Number Three*. Japan Echo, Volume 36, Nomor 6, Desember 2009. Hal. 35.

beberapa pilihan kebijakan, yang dapat diperankannya, dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Mencermati dinamika politik dan ancaman keamanan nasional Jepang di kawasan Asia Timur, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi Jepang, dan tentu saja, menjadi tantangan terberat, sekaligus tugas utama Shinzo Abe, sebagai perdana menteri baru Jepang. Lalu, bagaimana reaksi Shinzo Abe, dalam menanggapi masalah-masalah luar negeri yang dihadapi Jepang, khususnya di kawasan Asia Timur?

Dalam ulasan editor Kompas di beberapa terbitannya, Shinzo Abe, selama masa kampanyenya menjadi perdana menteri, telah berjanji untuk mengambil kebijakan tegas, dalam menyelesaikan masalah-masalah luar negeri yang dihadapi Jepang. Dalam hubungan Jepang-RRC, ia akan mengambil kebijakan garis keras, dan sikap yang lebih tegas dalam menghadapi agresifitas RRC, terkait sengketa kepulauan di Laut Cina Timur. Dia juga menegaskan, bahwa tak ada ruang negosiasi dengan RRC, terkait kepulauan yang disengketakan kedua negara, karena kepulauan itu bagian inheren dari Jepang.⁹ Shinzo Abe dengan tegas mengatakan, bahwa Jepang tak akan mundur setapak pun, untuk mempertahankannya. Bahkan pemerintahan LDP, mempelajari kemungkinan pembangunan pangkalan militer, dan penempatan birokrat, di pulau-pulau tak berpenghuni itu.¹⁰

Dalam satu tahun ini, hubungan bilateral Jepang-RRC diwarnai ketegangan, terkait sengketa teritorial di Laut Cina Timur. Gugus kepulauan yang oleh Jepang disebut Senkaku itu, diklaim oleh RRC sebagai bagian wilayahnya dengan nama Diaoyu.

⁹ Kompas (ed.). "*Abe: Tak Ada Ruang Negosiasi*". Kompas, 18 Desember 2012. Hal 9.

¹⁰ Ikrar Nusa Bhakti. *Loc Cit.*

Hubungan memanas setelah awal September lalu, pemerintah pusat Jepang memutuskan, membeli tiga dari lima pulau di gugus kepulauan itu, dari seorang pemilik pribadi di Jepang. Hal ini, langsung memicu aksi protes anti-Jepang besar-besaran di RRC, yang sempat mengganggu hubungan dagang kedua negara.¹¹

Terkait sengketa kepulauan Takeshima/Dokdo dengan Korea Selatan, menurut laporan Dyah Ratna Meta Novi, editor *Republika*, memaparkan bahwa, menjelang dilantik menjadi perdana menteri, Shinzo Abe memutuskan, akan mengirim utusan khusus ke Seoul, sebagai bentuk pernyataan sikap positif, untuk memperbaiki hubungan dengan negara tetangga tersebut, yang dalam satu tahun terakhir, mengalami ketegangan. Hubungan Korea Selatan-Jepang berubah dingin awal tahun 2012, ketika perdebatan kepulauan Dokdo/Takeshima, yang disengketakan kedua negara memanas. Masalah sengketa berubah menjadi konfrontasi, untuk menyikapi sejarah masa lalu. Seoul menuduh Tokyo, karena tak cukup merasa menyesal, atas perilakunya selama perang.¹²

Terkait krisis keamanan kawasan di Asia Timur, terlebih setelah Korea Utara berhasil meluncurkan roket jarak jauh, serta respon Korea Selatan yang melakukan pagelaran militer dengan bantuan Amerika Serikat di perairan Semenanjung Korea, dan meningkatnya agresifitas militer RRC di perairan Laut Cina Timur, Shinzo Abe menanggapi langsung, dengan turut mengerahkan delapan pesawat tempur F-15 Eagle, dimana empat diantaranya, langsung terbang ke kawasan sengketa.¹³ Selain itu, Jepang pun berhasil membujuk Amerika Serikat, untuk menggelar latihan perang skala besar di

¹¹ Kompas, 18 Desember 2012. *Loc Cit.*

¹² Dyah Ratna Meta Novi. (2012). "*Jepang ingin Perbaiki Hubungan dengan Korea*". <http://www.republik.co.id/berita/internasional/global/12/12/21/mfdh6a-jepang-ingin-perbaiki-hubungan-dengan-korea>. Diakses pada tanggal 21 April 2013, pukul 11.49 WITA.

¹³ Kompas, 14 Desember 2012. *Loc Cit.*

sekitar Okinawa, dekat perairan yang disengketakan antara RRC dan Jepang, 5 November 2012 lalu. Dalam latihan ini, lebih dari 45.000 tentara Amerika Serikat dan Jepang, mengikuti latihan perang hingga 16 November 2012, yang diberi nama *Keen Sword*. Latihan perang melibatkan operasi angkatan udara dan angkatan laut di sekitar Okinawa, sebelah utara dari kepulauan yang diklaim oleh Jepang dan RRC.¹⁴ Shinzo Abe juga berjanji akan menaikkan anggaran pertahanannya, serta menjanjikan revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang selama ini sangat membatasi kapabilitas militer Jepang.¹⁵

Seruan-seruan dan janji-janji serta tindakan Shinzo Abe selama masa kampanye tersebut, semakin mengindikasikan kebangkitan kembali militer Jepang. Terlebih lagi dalam pemerintahannya pada periode sebelumnya, Shinzo Abe pernah mengeluarkan kebijakan kontroversial, yang menaikkan status Badan Pertahanan Nasional Jepang menjadi Departemen Pertahanan pada tanggal 9 Januari 2007.¹⁶

Indikasi kebangkitan militer Jepang ini, bisa membahayakan stabilitas keamanan kawasan di Asia Timur, di masa depan. Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila Jepang dan negara-negara tetangganya, tidak dapat menahan diri, dan membiarkan bentrokan terjadi. Kompleksitas sejarah antara RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara dengan Jepang, memang sulit dihindari. Dalam kaitan itulah, Jepang harus berhati-hati, dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan politik luar negeri dan pertahanannya.

¹⁴ Ervan Hardoko. (2012). "AS dan Jepang Latihan Perang di Perairan Sengketa." <http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/18071157/AS.dan.Jepang.Latihan.Perang.di.Perairan.Sengketa>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.21 WITA.

¹⁵ Kompas.com (ed.). (2012). "LDP Diprediksi Menang". <http://internasional.kompas.com/read/2012/12/07/02243733/LDP.Diprediksi.Menang>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2013, pukul 13.32 WITA.

¹⁶ Anak Agung Banyu Perwita. (2007). *Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik*. Jakarta: Analisis CSIS, Volume 36, Nomor 1, Maret 2007. Hal. 55.

Kini, kita menunggu, bagaimana arah kebijakan politik luar negeri Jepang, di bawah pemerintahan Shinzo Abe, setelah kembali menjadi perdana menteri Jepang untuk kali keduanya. Penulis kemudian tertarik, untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Shinzo Abe di kawasan Asia Timur, ke dalam skripsi yang berjudul, **“Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang di Asia Timur di Bawah Pemerintahan Shinzo Abe”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada latar belakang di atas, penelitian ini akan memfokuskan pada kebijakan politik luar negeri Shinzo Abe setelah memimpin Jepang yang kedua kalinya, dalam hal substansi kebijakannya, sehingga mengundang pertanyaan penelitian:

1. Apa yang mendasari kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur di bawah pemerintahan Shinzo Abe?
2. Bagaimana wujud kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur di bawah pemerintahan Shinzo Abe?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui hal yang mendasari kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur di bawah pemerintahan Shinzo Abe.

- b. Untuk mengetahui wujud kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur di bawah pemerintahan Shinzo Abe.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

- a. Kegunaan Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya, dan pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya, mengenai kajian wilayah Asia Timur, khususnya mengenai kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur di bawah pemerintahan Shinzo Abe.

- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan (pemerintah), dalam membuat kebijakan menyangkut kebijakan pertahanan nasional Jepang, dan penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kepulauan Jepang dengan RRC dan Korea Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur, turut mempengaruhi interkoneksi antar negara, yang terwujud dalam hubungan bilateral, serta perwujudan politik luar negeri masing-masing negara, yang merupakan alat negara, untuk mencapai kepentingan nasionalnya di negara lain. Adanya perbedaan kepentingan yang menjadi tujuan setiap negara, mengakibatkan interkoneksi antar negara di kawasan ini juga

beragam, tidak hanya pada kerangka politik dan diplomasi, tetapi juga pada ranah kerjasama strategi militer dan pertahanan.

Dalam merumuskan politik luar negeri, suatu negara harus memperhatikan aspek domestik, serta aspek eksternal, sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Memperhatikan aspek domestik yang dimiliki, sebagai bahan pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan, merupakan hal yang sangat penting, karena aspek ini sangat berpengaruh, pada konsep politik luar negeri bagaimana yang akan digunakan oleh suatu negara. Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara, yang ditujukan ke negara lain, untuk mencapai kepentingan nasional.

Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Frankel, yang mengatakan bahwa:

“Politik luar negeri suatu negara merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan keluar negeri, yang tidak terpisah dari tujuan-tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri”.¹⁷

Lebih lanjut, Soesiswo Soenarko, seorang analis politik luar negeri, berpendapat bahwa:

“Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai, dan instrumen yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara, dapat dilihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, tergambar dari strategi diplomasi, yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan”.¹⁸

Pemerintah ataupun para pembuat keputusan haruslah mempersiapkan strategi atau rencana tindakan, untuk mencapai tujuan nasional, yang secara spesifik dituangkan

¹⁷ J. Frankel. (1990). *Hubungan Internasional*. Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara. Hal.55.

¹⁸ Zainuddin Djafar. (1996). *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. Hal. 97.

dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri pada dasarnya merupakan pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara yang ditujukan keluar negeri. Dengan demikian, kepentingan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri.

Dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di arena internasional, setiap negara menghubungkan negaranya kepada peristiwa dan situasi di luar negaranya, melalui kebijakan luar negeri. J. Frankel, seorang ahli hubungan internasional, menjelaskan bahwa, “kebijakan luar negeri adalah subjek dari saling mempengaruhi, antara lingkungan dalam negeri dan lingkungan luar negeri”.¹⁹

Konsep ini memberi pemahaman, bahwa dalam pengambilan kebijakan luar negeri, suatu negara haruslah memperhatikan aspek-aspek domestik, yakni unsur-unsur pembangun kekuatan nasionalnya, serta aspek eksternal, yakni bagaimana suatu negara memaknai kondisi yang terjadi di lingkungan internasional. Politik luar negeri Jepang di Asia Timur merupakan formulasi tindakan Jepang, terhadap kondisi lingkungan eksternalnya, yang memberikan kekhawatiran bagi keamanan nasionalnya, serta kondisi domestik, yang menginginkan keterlibatan Jepang, dalam merespon krisis keamanan di Asia Timur, yang menopang formulasi tindakan tersebut.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik, sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, dipersepsikan oleh para pembuat keputusan, dalam suatu proses konversi menjadi output. K.J. Holsti, seorang ahli politik internasional, menyatakan bahwa:

¹⁹ J. Frankel. (1991). *Hubungan Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 33.

Kebijakan, sikap, atau tindakan negara, merupakan output politik luar negeri, output tersebut, merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan, untuk menanggulangi permasalahan, atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.²⁰

Kebijakan pemerintah Jepang, khususnya di bawah pemerintahan Shinzo Abe, merupakan tindakan dalam memaknai dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pertahanan dalam menjaga keamanan nasional Jepang, serta penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kedaulatan di perairan laut lepas, dengan RRC dan Korea Selatan, yang dituangkan dalam kebijakan politik luar negeri.

Terpilihnya Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang di saat-saat krisis keamanan dan politik di Asia Timur, menimbulkan berbagai reaksi di luar Jepang, terutama mengenai kepribadian politiknya, yang nasionalis dan revisionis. Sosok Shinzo Abe memang dikenal sebagai politisi sayap kanan yang fundamentalis. Shinzo Abe dianggap sebagai pelindung gerakan revisionis sejarah Jepang. Kepribadian politik Shinzo Abe dapat dilihat dari karakter kepemimpinannya yang tegas, kuat, berani, dan berwibawa, serta memiliki kepribadian yang kharismatik, patriotik, dan berjiwa nasionalisme yang tinggi.

Kembalinya Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang, akan membawa pengaruh besar, pada arah kebijakan politik luar negeri Jepang, dan implikasinya bagi Asia Timur. Politik luar negeri Jepang dalam beberapa tahun terakhir sepeninggal Shinzo Abe, dinilai kurang memiliki power dan wibawa, khususnya di mata RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara. Bagi ketiga negara tersebut, kehadiran kembali Shinzo Abe merupakan

²⁰ K.J. Holsti. (1987). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta. Hal. 131.

hal yang tidak diharapkan. Beberapa kebijakan kontroversialnya di masa lalu, yang nasionalistik, revisionis, dan militeristik, dipandang akan kembali dilakukannya, demi menunjukkan kapabilitas kepemimpinannya, serta power Jepang yang sesungguhnya. Kondisi ini, bisa jadi, semakin memperburuk eskalasi politik dan keamanan di kawasan Asia Timur.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian berdasarkan tempat penelitian, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).²¹ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, dalam bentuk melakukan pengumpulan bahan-bahan pustaka, baik berupa jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, serta beberapa situs internet, yang erat berkaitan dengan materi skripsi penulis.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode telaah pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, serta beberapa situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun tempat penelitian yang akan dikunjungi penulis adalah beberapa perpustakaan terpilih, yang penulis anggap, menyediakan data yang penulis maksud di

²¹ Etta Mamang Sangadji & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal. 28.

atas, yaitu: Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar, Perpustakaan Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, dan Perpustakaan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) di Jakarta.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, kemudian dijelaskan dan dianalisa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan disusun dalam suatu tulisan, serta ditarik suatu kesimpulan akhir, dari data dan fakta yang ada. Pokok analisa dalam tulisan ini adalah kebijakan politik luar negeri Jepang di kawasan Asia Timur, dalam hal peningkatan kapabilitas pertahanan, dan penyelesaian sengketa-sengketa wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri

Dinamika politik luar negeri Jepang dari waktu ke waktu, tidak dapat dipisahkan dari berbagai perkembangan yang muncul, baik di lingkungan internal, maupun di lingkungan eksternal Jepang. Kedua faktor ini memiliki andil yang besar, tidak hanya dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Jepang, namun juga dalam hal implementasi kebijakan tersebut melalui kegiatan diplomasi. Tak dapat dipungkiri bahwasanya pembuatan politik luar negeri, selalu terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam negeri.

Dalam merumuskan politik luar negeri, suatu negara harus memperhatikan aspek domestik, serta aspek eksternal, sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Memperhatikan aspek domestik yang dimiliki, sebagai bahan pertimbangan sebelum menetapkan kebijakan, merupakan hal yang sangat penting, karena aspek ini sangat berpengaruh, pada konsep politik luar negeri bagaimana yang akan digunakan oleh suatu negara.

Meminjam istilah Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa, “*foreign policy begins when domestic policy ends*”.²² Dengan kata lain, politik luar negeri berada antara aspek dalam negeri

²²Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 48.

suatu negara (domestik), dan aspek internasional (eksternal). Artinya, dalam merumuskan politik luar negeri, suatu negara haruslah memperhatikan aspek-aspek domestik, yakni unsur-unsur pembangun kekuatan nasionalnya, serta aspek eksternal, yakni bagaimana suatu negara memaknai kondisi internasional.

Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara, yang ditujukan ke negara lain, untuk mencapai kepentingan nasional. Pernyataan ini sejalan dengan pemikiran Frankel, yang mengatakan bahwa:

“Politik luar negeri suatu negara merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan keluar negeri, yang tidak terpisah dari tujuan-tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri”.²³

Lebih lanjut, Soesiswo Soenarko, seorang analis politik luar negeri, berpendapat bahwa:

“Politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai, dan instrumen yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara, dapat dilihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut, tergambar dari strategi diplomasi, yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan”.²⁴

Politik luar negeri Jepang di Asia Timur merupakan formulasi tindakan Jepang, terhadap kondisi lingkungan eksternalnya, yang memberikan kekhawatiran bagi keamanan nasionalnya, serta kondisi domestik, yang menginginkan keterlibatan Jepang, dalam merespon krisis keamanan di Asia Timur, yang menopang formulasi tindakan tersebut.

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi, ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal semakin meningkatkan tuntutananya,

²³ J. Frankel. (1990). *Op Cit.* Hal.55.

²⁴ Zainuddin Djafar. *Op Cit.* Hal. 97.

berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman, bagi keberadaan negara-bangsa tersebut. Kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut, diproses di dalam benak para pembuat keputusan, yang bertindak untuk meminimalkan resiko, dan memaksimalkan peluang-peluang, yang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan, mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka.

Adanya pergantian perdana menteri Jepang yang kembali dinahkodai oleh Shinzo Abe, yang memiliki kepribadian politik yang tegas dan berani, serta kecenderungannya menerapkan kebijakan militeristik, dalam menghadapi kondisi internasional yang berkenaan dengan kedaulatan dan kepentingan nasional Jepang, turut mempengaruhi perubahan politik luar negeri Jepang. Selain itu, kembalinya LDP sebagai partai mayoritas di Parlemen, akan memudahkan jalan bagi pemerintahan Shinzo Abe, dalam pengambilan kebijakan luar negeri Jepang, serta membawa harapan, bagi eksistensi revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang selama ini mengekang militerisme Jepang. Tak heran, jika isu amandemen Pasal 9 mencuat, sebagai respon terhadap dinamika eksternal dari hubungan internasional Jepang.

Lingkungan eksternal Jepang banyak dipengaruhi oleh faktor situasional di kawasan Asia Timur. Terlebih, dalam satu tahun terakhir, Jepang mengalami hubungan buruk dengan negara-negara tetangganya, khususnya RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara, terkait sengketa wilayah kepulauan, dan ancaman keamanan kawasan, yang memungkinkan bagi Jepang, untuk mengkaji kembali kebijakan politik luar negeri dan pertahanannya.

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan pencerminan dari kepentingan nasional suatu negara, yang ditunjukkan keluar negeri. Dengan demikian, kepentingan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan politik luar negeri. Jack C. Plano dan Roy Otton, penulis buku *Kamus Hubungan Internasional*, menjelaskan bahwa:

“Kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir, yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara, dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi”.²⁵

Pendapat ini memberi arti bahwa kepentingan nasional sangat menentukan, bagaimana bentuk kebijakan yang akan diterapkan suatu negara. Konsep ini pula, yang akan membantu menjelaskan, dan memahami perilaku politik luar negeri suatu negara, dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain. Pemerintah ataupun para pembuat keputusan, haruslah mempersiapkan strategi, atau rencana tindakan, untuk mencapai tujuan nasional, yang secara spesifik dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Dalam politik luar negeri Jepang terhadap kawasan Asia Timur, kepentingan nasionalnya merupakan upaya Jepang dalam mengukuhkan wilayah kedaulatannya di perairan Laut Cina Timur, yang disengketakan oleh RRC dan Korea Selatan, mengembalikan posisi ekonomi dan power politiknya di kawasan, mengurangi pengaruh RRC di negara-negara yang berhubungan atau berbatasan dengan RRC, serta berusaha mengendalikan krisis keamanan kawasan, untuk menguatkan posisinya, dan menunjukkan kepemimpinannya di kawasan Asia Timur.

²⁵ Jack C. Plano & Roy Otton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin. Hal. 17.

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional di arena internasional, setiap negara menghubungkan negaranya, kepada peristiwa dan situasi di luar negaranya, melalui kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan implementasi dari politik luar negeri yang disusun oleh suatu negara. J. Frankel, seorang ahli hubungan internasional, menjelaskan bahwa, “kebijakan luar negeri adalah subjek dari saling mempengaruhi, antara lingkungan dalam negeri dan lingkungan luar negeri”.²⁶ Konsep ini memberi pemahaman, bahwa dalam pengambilan kebijakan luar negeri, suatu negara haruslah memperhatikan aspek-aspek domestik, yakni unsur-unsur pembangun kekuatan nasionalnya, serta aspek eksternal, yakni bagaimana suatu negara memaknai kondisi yang terjadi di lingkungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik, sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, dipersepsikan oleh para pembuat keputusan, dalam suatu proses konversi menjadi output. K.J. Holsti, seorang ahli politik internasional, menyatakan bahwa:

Kebijakan, sikap, atau tindakan negara, merupakan output politik luar negeri. Output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan, untuk menanggulangi permasalahan, atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional.²⁷

Kebijakan pemerintah Jepang, khususnya di bawah pemerintahan Shinzo Abe, merupakan tindakan dalam memaknai dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pertahanan dalam menjaga keamanan nasional Jepang, serta penyelesaian sengketa-sengketa wilayah

²⁶ J. Frankel. *Op Cit.* Hal. 33.

²⁷ K.J. Holsti. *Op Cit.* Hal. 131.

kedaulatan di perairan laut lepas, dengan RRC dan Korea Selatan, yang dituangkan dalam kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri pada dasarnya menekankan aksi atau tindakan suatu negara, dalam memaknai kondisi di lingkungan eksternalnya, dalam rangka memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasionalnya.²⁸ Kepentingan nasional yang ingin dicapai, haruslah terwujud dalam bentuk nyata, yang sekaligus merupakan implementasi dari politik luar negeri yang disusun sebelumnya. Langkah-langkah nyata itu, biasanya berupa kebijakan luar negeri, yang diterapkan suatu negara terhadap negara lain.

Mark R. Amstutz, seorang pakar politik internasional, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai, “*explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundaries*”.²⁹ Dalam definisi ini, ada tiga tekanan utama, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara.

Suatu kebijakan luar negeri memiliki suatu tujuan, serta aksi-aksi tertentu, yang dibuat untuk mempertahankan ataupun mengubah suatu objek, suatu kondisi tertentu, maupun sebagai respon terhadap lingkungan eksternal. Jadi kebijakan luar negeri, bisa merupakan aksi, bisa pula reaksi, terhadap kondisi eksternal. Sedangkan unit analisa dari

²⁸ Aleksius Jemadu. (2008). *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 61.

²⁹ Mark R. Amstutz. (1995). *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown & Benchmark. Hal. 146.

kebijakan luar negeri, meliputi: aktor-aktor, lingkungan internasional, serta situasi tertentu.³⁰

Dalam studi Hubungan Internasional, kebijakan luar negeri merupakan kajian realis, dimana negara-bangsa, merupakan satu-satunya aktor dalam upaya pencapaian kepentingan nasional negara, melalui kerangka politik luar negeri, dan memandang individu, atau aktor lain yang berperan di dalamnya, sebagai bagian dari negara. Dalam politik luar negeri suatu negara, paham realis ini, dapat dilihat dari pelaksanaan politik luar negeri, yang bersifat unilateralis (*unilateralism*), nasionalis (*nationalism*), dengan strategi penangkalan (*deterrence*), perimbangan kekuatan (*balance of power*) dan aliansi-aliansi pertahanan (*defence alliances*).³¹

Dalam konteks negara, seperti yang diterapkan Jepang terhadap dinamika politik dan keamanan di Asia Timur, para pemimpin Jepang menampilkan sosok nasionalis, dengan melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni, melakukan reorientasi kebijakan pertahanan Jepang dengan meningkatkan status Badan Pertahanan Jepang menjadi Departemen Pertahanan, menaikkan anggaran militer, dan adanya keinginan kuat merevisi Pasal 9 Konstitusi Jepang, untuk kembali menjadi negara normal, serta tetap mempertahankan kerjasama aliansi militer dengan Amerika Serikat.

Kebijakan Jepang tersebut sebagai upaya untuk memaksimalkan posisi kekuatan (power) relatifnya dibandingkan negara lainnya, atau setidaknya tercipta *balance of power* di kawasan Asia Timur. Semakin besar keuntungan kekuatan militernya, akan semakin

³⁰ T. May Rudy. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Refika Aditama. Hal. 89-90.

³¹ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. *Op Cit.* Hal. 25.

besar pula jaminan keamanan yang dimiliki Jepang, utamanya dalam merespon kekuatan nuklir Korea Utara, dan militer RRC.

B. Konsep Kawasan dan Regionalisme

Dinamika hubungan internasional di Asia Timur, tak bisa dilepaskan dari pandangan tentang konsep kawasan/region dan regionalisme. Interaksi yang terbentuk antara Jepang dengan negara-negara tetangganya, secara tidak langsung membentuk integrasi kawasan, yang dimotori oleh peningkatan kerjasama ekonomi, dan interkoneksi perdagangan. Interkoneksi yang terbentuk dari interaksi antara Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara tersebut, menjadi suatu sub-kawasan yang mampu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya di Asia.

Merujuk kepada definisi Louis Cantori dan Steven Spiegel, kedua teoritis ini mendefinisikan,

Region/kawasan sebagai dua negara atau lebih yang saling berinteraksi, dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah, serta perasaan identitas yang seringkali meningkat, disebabkan adanya aksi dan tindakan, dari negara-negara di luar kawasan.³²

Pendapat yang sejalan dengan pemikiran ini ialah Mansbaach, yang berpendapat bahwa,

Region/kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi

³² Louis J. Cantori & Steven Spiegel. (1970). *The International Politics of Regions: A Comparative Approach*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Hal. 22-25.

yang saling menguntungkan, komunikasi, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional.³³

Demikian pula halnya, hubungan antara Jepang dengan RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara, adanya kesamaan yang dimiliki dalam hal etnis, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah, serta kedekatan geografis, menyebabkan keempat negara di kawasan Asia Timur ini, saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan pembangunan, serta kerjasama dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan perdamaian di kawasan.

Interaksi antar negara dalam kawasan, menurut Cantori dan Spiegel, terdiri atas empat variabel, yakni: sifat dan tingkat kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat power yang dimiliki aktor kawasan, dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan. Lebih jauh, mereka membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian, yaitu: *core sector* (negara inti kawasan), *peripheral sector* (negara pinggiran kawasan), dan *intrusive sector* (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan).³⁴

Interaksi antar negara-negara di kawasan Asia Timur dalam satu tahun terakhir ini, mengalami hubungan buruk, terkait beberapa permasalahan sengketa wilayah kepulauan, antara Jepang dengan RRC dan Korea Selatan, serta ancaman stabilitas keamanan kawasan, dari agresifitas militer RRC dan Korea Utara, serta indikasi kebangkitan kembali militerisme Jepang. Kondisi ini akan diperparah, dengan kehadiran militer Amerika Serikat, sebagai aktor di luar kawasan, yang turut berpartisipasi dalam

³³ Nuraeni S, Deasy Silvy & Arfin Sudirman. (2010). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 1.

³⁴ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. *Op Cit*. Hal. 104-105.

membentengi Korea Selatan, dari ancaman Korea Utara, dan negara-negara Asia Timur lainnya, yang berada dalam perlindungan militer Amerika Serikat di kawasan ini.

Konsep tentang region/kawasan dan regionalisme memiliki perbedaan pandangan. Region/kawasan dan sub-region/sub-kawasan menurut Joseph Nye, seorang teoritis hubungan internasional, mengemukakan bahwa, konsep ini bersifat ambiguitas, karena suatu pembagian region/kawasan yang didasarkan pada aspek keamanan, mungkin dapat berbeda dari region/kawasan ekonomi.³⁵

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai region/kawasan dan regionalisme, kita perlu memahami atau mengkaji lebih mendalam, untuk memperoleh definisi yang tepat, berdasarkan pada objek kajian yang ditelaah. Coulumbis dan Wolfe, dua ilmuwan besar Hubungan Internasional, dalam bukunya yang berjudul, *Introductions to International Relations, Power and Justice*, memberikan kontribusi tentang empat cara atau kriteria, yang bisa kita pergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah region/kawasan³⁶, yaitu:

1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, dan kepulauan, seperti Eropa dan Asia.
2. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, seperti Blok Sosialis dan Blok Kapitalis.

³⁵ *Ibid.* Hal. 103-104.

³⁶ Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe. (1986). *Introduction to International Relations, Power and Justice. Third Edition.* Longman Inc. Hal. 306-307.

3. Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti negara-negara industrialis dan negara-negara berkembang.
4. Kriteria Transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, serta barang dan jasa, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep region dan regionalisme dikaji dengan istilah Studi Kawasan. Studi Kawasan biasa didefinisikan dengan menyandarkan atau menekankan kepada basis geografi dari negara-negara yang dikaji. Penekanan pada basis geografi ini memang cukup beralasan, karena pada kenyataannya, geografi adalah kriteria paling permanen dibandingkan kriteria sosial lainnya.³⁷ Sehingga, Studi Kawasan dipahami sebagai ilmu yang mempelajari kawasan tertentu, yang biasanya terdiri dari sekumpulan negara-negara yang saling berdekatan, dan disatukan oleh kemiripan-kemiripan, seperti bahasa, agama, kebudayaan, latar belakang sejarah, etnis, dan arah politik.³⁸ Dari pengertian Studi Kawasan di atas, muncul kawasan-kawasan yang sudah dikenal sekarang, salah satunya ialah Asia Timur. Dalam pendekatan geografi dan sosial, kawasan Asia Timur mencakup RRC, termasuk Taiwan dan wilayah otonomi Hongkong dan Makau, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Mongolia.

Perbincangan mengenai krisis keamanan dan politik di Asia Timur, tak bisa dilepaskan dari pandangan tentang konsep kawasan/region dan regionalisme. Secara teoritis, pembahasan mengenai keterhubungan konsep keamanan dengan kawasan, dapat

³⁷ I Nyoman Sudira. (1999). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hal. 151.

³⁸ T. May Rudy. *Op Cit*. Hal. 150-151.

ditelusuri melalui konsep *Ecological Triad*, yang diberikan Harold dan Margareth Sprout. Konsep ini terdiri dari aktor/pelaku, lingkungan, dan hubungan antara aktor dan lingkungan. Suatu aktor (negara-bangsa) akan selalu berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya, baik yang secara geografis berdekatan, maupun yang berjauhan.³⁹

Sementara itu, konsep tentang regionalisme dapat dianalisis dari pandangan Bruce Russel, yang melihatnya dari ikatan sosial (*social cohesiveness* berupa ikatan etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, dan kesadaran akan warisan bersama), ikatan ekonomi, (*economic cohesiveness* yaitu pola-pola perdagangan, dan kesalingtergantungan ekonomi), ikatan politik (*politic cohesiveness* berupa tipe rezim, dan ideologi), dan ikatan organisasional (*organizational cohesiveness* dengan melihat keberadaan atau eksistensi dari suatu institusi regional secara formal).⁴⁰

Asia Timur merupakan salah satu bentuk regionalisme yang terbentuk, tidak hanya karena kedekatan geografis dan sosial, tetapi lebih karena adanya jalinan kerjasama ekonomi, dan saling ketergantungan dalam pembangunan, serta kerjasama dalam menumbuhkan perdamaian, stabilitas politik, dan keamanan di kawasan. Dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur ini, turut mempengaruhi interkoneksi antar negara, yang terwujud dalam hubungan bilateral dan regional, serta perwujudan kebijakan luar negeri masing-masing negara, yang merupakan alat negara, untuk mencapai kepentingan nasionalnya di negara lain, dan juga di kawasan.

Adanya perbedaan kepentingan yang menjadi tujuan setiap negara, mengakibatkan interkoneksi antar negara di kawasan ini juga beragam, tidak hanya

³⁹ Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochammad Yani. *Op Cit.* Hal. 104.

⁴⁰ Nuraeni S, Deasy Silvy & Arfin Sudirman. *Op Cit.* Hal. 6.

pada kerangka politik dan diplomasi, tetapi juga pada ranah kerjasama strategi militer dan pertahanan. Kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, sangat ditentukan oleh bagaimana sikap, peran, dan pengaruh, serta hubungan kerjasama, dan kebijakan politik luar negeri, negara-negara di kawasan ini, dalam menyikapi krisis Semenanjung Korea dan ketegangan di Laut Cina Timur.

Interaksi dan hubungan kerjasama antar negara-negara dalam kawasan ini, yang akan penulis kaji, dengan menitikberatkan pada kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur, di bawah pemerintahan Shinzo Abe, dengan menganalisis kebijakan di bidang pertahanan, serta penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kepulauan, di perairan Laut Cina Timur. Negara-negara Asia Timur yang menjadi sampel penelitian, yakni Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN
POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DAN KAWASAN ASIA TIMUR

A. Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang

1. Dasar Kebijakan

Berbagai isu yang melingkupi kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Jepang memang menjadi pembicaraan hangat sepanjang sejarah, khususnya pasca Perang Dunia II. Isu utama biasanya berkisar pada posisi dan peran Jepang, dalam memelihara stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam konstelasi politik, ekonomi, dan keamanan global, khususnya di kawasan Asia Timur, dalam beberapa tahun terakhir, telah memaksa Jepang, untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri dan pertahanannya.

Secara umum, dalam arena internasional, menurut Lim Hua Sing, seorang pengamat ekonomi politik, mengatakan bahwa, suatu negara yang secara ekonomi kuat, juga memiliki pengaruh politik dan diplomatik yang kuat, sebaliknya, Jepang tidak. Dikatakan dengan sinisme, bahwa Jepang merupakan raksasa ekonomi, tetapi kerdil dalam bidang politik dan diplomatik.⁴¹ Kebijakan-kebijakan Jepang terhadap masalah-masalah internasional selama ini, sangat banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Tentu saja, ada sejumlah pengecualian yang spektakuler.

⁴¹ Lim Hua Sing. (2001). *Peranan Jepang di Asia, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 252.

Menarik juga diperhatikan, bahwa RRC, saingan Jepang di Asia Timur, merupakan negara yang kini mengalami perkembangan ekonomi yang mengagumkan, bahkan pada 2009 lalu, telah mengambil alih posisi Jepang selama ini, sebagai negara dengan tingkat perekonomian terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat, tidak dapat diabaikan pengaruh politik, diplomatik, dan militernya.

Dalam situasi-situasi baru ini, akankah Jepang terus menjadi negara raksasa ekonomi, namun kerdil dalam hal politik? Tentu saja, pemerintahan baru Jepang, sangat diharapkan memberikan lebih banyak penentuan terhadap isu-isu internasional, sebagai akibat dari kekuatan ekonominya. Dengan kata lain, sangat wajar bagi Jepang, untuk menggunakan pengaruh politik dan diplomatiknya, sejalan dengan kekuatan ekonominya. Hal inilah, yang menjadi landasan utama kebijakan pemerintahan Shinzo Abe, dalam memperjuangkan politik luar negeri Jepang di arena internasional, terutama mengenai penyelesaian sengketa wilayah Kepulauan Senkaku dan Takeshima, peredaan ketegangan di Semenanjung Korea, peningkatan kapabilitas pertahanan Jepang, serta upaya Jepang untuk menjadi negara normal yang memiliki angkatan militer.

Dalam kebijakan politik luar negeri Jepang terhadap kawasan Asia Timur ini, kepentingan nasionalnya merupakan upaya Jepang dalam mengukuhkan wilayah kedaulatannya di perairan Laut Cina Timur, yang disengketakan oleh RRC dan juga Korea Selatan, mengembalikan posisi ekonomi dan power politiknya di kawasan, mengurangi pengaruh RRC di negara-negara yang berhubungan atau berbatasan dengan RRC, serta berusaha mengendalikan krisis keamanan kawasan, untuk menguatkan posisinya, dan menunjukkan kepemimpinannya di kawasan Asia Timur.

Dalam bidang pertahanan, perubahan fundamental kebijakan pertahanan Jepang mencapai titik terpenting tatkala parlemen menyetujui usulan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defence Agency*). Hasilnya, pada tanggal 9 Januari 2007, secara resmi Badan Pertahanan Jepang berubah menjadi Departemen Pertahanan.⁴² Peningkatan status ini sebagai respon terhadap dinamika konstelasi politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, yang semakin meningkat ke level yang mengkhawatirkan. Kondisi inilah yang mendasari Jepang untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan nasional Jepang dan stabilitas di kawasan Asia Timur.

Kompleksitas perkembangan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, telah menyadarkan para pemimpin Jepang, untuk mereformulasi politik luar negeri dan pertahanannya. Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi, dari kondisi dalam negeri, yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya, politik luar negeri Jepang, tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Faktor internal Jepang dipengaruhi oleh perkembangan terbaru politik dalam negeri Jepang, dimana pada akhir tahun 2012 lalu, telah berhasil mengadakan pemilu Parlemen dan perdana menteri, yang berhasil dimenangkan oleh partai LDP sebagai partai mayoritas di Parlemen, dan Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang yang baru. Kembalinya Shinzo Abe sebagai perdana menteri Jepang, akan memberikan dampak

⁴² Anak Agung Banyu Perwita. *Loc Cit.* Hal. 55.

signifikan terhadap kebijakan politik luar negeri dan pertahanan Jepang. Terlebih lagi, dukungan suara mayoritas LDP di Parlemen, akan memudahkan jalan bagi Shinzo Abe dalam proses pengambilan keputusan di setiap kebijakannya.

Perkembangan yang sangat menarik dari politik dalam negeri Jepang adalah adanya keinginan Jepang, untuk membangun kembali kekuatan militernya, sebagai basis keamanan dan pertahanan Jepang, yang selama ini bergantung pada Amerika Serikat. Terlebih setelah Shinzo Abe kembali memimpin Jepang, yang memiliki hasrat besar untuk mengembalikan Jepang sebagai “negara normal” yang memiliki angkatan pertahanan nasional.

Isu ini telah memberikan dampak signifikan bagi dinamika eksistensi Pasal 9, yang telah banyak diperdebatkan oleh para anggota Parlemen, antara mereka yang menginginkan amandemen Pasal 9, berlawanan dengan mereka yang tetap menganggap Pasal 9 sebagai Pasal Pasifis, yang tidak perlu diamandemenkan. Hal ini telah memberikan dampak, bagi semakin tidak jelasnya fungsi militer di Jepang, dimana, di satu sisi dianggap sebagai pasukan *self-defense*, tapi di sisi yang lain, mereka memiliki kemampuan yang setara dengan militer. Tak heran jika isu amandemen Pasal 9 mencuat, sebagai respon terhadap dinamika eksternal dari hubungan internasional Jepang.

Sementara itu, faktor eksternal, banyak dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi di kawasan Asia Timur, sehingga memberikan persepsi tersendiri bagi Jepang, untuk terus dapat mengamankan integritas wilayah, dan keamanan nasionalnya yang semakin terancam dari pengaruh luar. Persepsi ancaman tersebut, utamanya datang dari negara-negara tetangga terdekat Jepang di Asia Timur. Persepsi ancaman ini menjadi dasar

kebijakan pemerintahan Jepang, dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan strategis bagi politik luar negeri dan pertahanan Jepang.

Persepsi ancaman utama berasal dari RRC, yang dianggap sebagai kekuatan penyeimbang Jepang di kawasan. Perselisihan RRC–Jepang, terutama yang terkait dengan luka sejarah ekspansi Jepang ke RRC pada masa Perang Dunia, telah membentuk persepsi Jepang mengenai potensi retaliasi. Peningkatan kekuatan dan anggaran militer RRC, serta modernisasi militer negara tersebut, membuat Jepang khawatir akan ancaman terhadap keamanan wilayahnya. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Jepang bersengketa dengan RRC, terkait status kepemilikan kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Insiden patroli kelautan militer RRC di kepulauan Senkaku, yang disengketakan oleh kedua negara pada 13 Desember 2012 lalu, menguatkan indikasi ancaman tersebut.

Selain RRC, persepsi ancaman tersebut, juga berasal dari Korea Utara. Masalah nuklir Korea Utara juga menimbulkan potensi ancaman bagi Jepang. Peluncuran roket jarak jauh Unha-3 yang berhasil mengorbitkan satelit Kwangmysong-3 pada 12 Desember 2012 lalu, dipandang berpotensi mengancam stabilitas keamanan nasional Jepang dan Asia Timur. Perkembangan nuklir Korea Utara tersebut, dapat memicu Jepang untuk selalu waspada, akan kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik, yang bisa muncul akibat pengembangan dan uji coba nuklir mereka.

Selain RRC dan Korea Utara, Jepang juga berpotensi konflik dengan Korea Selatan. Negara ini memiliki permasalahan dengan Jepang mengenai Kepulauan Dokdo/Takeshima. Korea Selatan berpendapat bahwa Jepang jangan memaksakan klaim atas Takeshima, sebutan Jepang untuk Dokdo, karena itu merupakan hasil pencaplokan

masa imperiumnya. Dokdo pertama kali diklaim oleh Jepang pada 22 Februari 1905. Permasalahan ini masih berlanjut hingga sekarang, dan sempat mengganggu hubungan diplomasi kedua negara.

Dengan demikian, berbagai faktor tersebut, telah membentuk persepsi Jepang akan potensi ancaman yang datang dari lingkungan eksternalnya. Faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi para pengambil kebijakan dalam pemerintahan Jepang, untuk melakukan reorientasi kebijakan pertahanan nasionalnya, serta kebijakan politik luar negerinya, dalam memaknai kondisi politik internasional di lingkungan sekitarnya.

2. Tujuan Kebijakan

Secara lebih spesifik, kerangka kebijakan pertahanan Jepang yang baru, menggariskan beberapa fokus utama. Fokus pertama ialah perubahan persepsi ancaman yang semakin meningkat terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Jepang, seperti kemungkinan serangan senjata balistik dari Korea Utara dan RRC. Bila sebelumnya, Jepang menghindari untuk menyebut Korea Utara dan RRC secara eksplisit sebagai ancaman utamanya, kini Jepang secara tegas menyebutkan kedua negara tersebut, sebagai ancaman militer terbesar bagi Jepang. Kedua negara ini, tidak hanya memiliki kekuatan militer konvensional yang cukup kuat, akan tetapi, juga dilengkapi dengan kapabilitas nuklir. Oleh karena itu, RRC dan Korea Utara bagi Jepang, merupakan *major destabilizing factors* di kawasan Asia Timur dan Pasifik, sehingga Jepang sedapat mungkin ingin menjaga *balance of power* di kawasan.⁴³

⁴³ *Ibid.* Hal. 56.

Selain itu, persoalan Kepulauan Senkaku yang sempat memanas, ketika RRC dan Jepang masing-masing mengerahkan patroli kelautan di wilayah kepulauan yang disengketakan tersebut, pada 13 Desember 2012 lalu, mengancam stabilitas keamanan dan mengakibatkan hubungan bilateral kedua negara semakin menurun. Dengan kata lain, kemungkinan tingkat konflik terbuka antara Jepang dan RRC, akan semakin tinggi. Oleh karenanya, Jepang patut mempersiapkan skenario terburuk dalam hubungan bilateralnya dengan RRC.

Fokus utama berikutnya merujuk pada cakupan dan sifat baru tanggungjawab pertahanan Jepang. Kebijakan pertahanan Jepang yang baru telah menggariskan dua misi utama pertahanan, yaitu: mempertahankan tanah air Jepang, dan melakukan aktivitas kerjasama untuk memelihara perdamaian internasional.⁴⁴ Perwujudan dari misi ini, dapat dilihat dari tindakan pemerintahan Jepang, yang langsung merespon patroli udara RRC di kepulauan Senkaku pada 13 Desember 2012 lalu, dan penegasan Shinzo Abe yang mengatakan bahwa tak ada ruang negosiasi dengan RRC terkait kepulauan Senkaku, merupakan bentuk keseriusan Jepang dalam menjaga tanah air mereka.

Selain itu, Jepang juga berhasil membujuk Amerika Serikat untuk menggelar latihan perang skala besar di sekitar Okinawa, dekat perairan yang disengketakan antara Jepang dan RRC pada 5 November 2012 lalu, serta keberhasilan Shinzo Abe melakukan lawatan kenegaraan ke Filipina, Vietnam, Indonesia, India, dan Australia guna menjajaki kerjasama keamanan berlapis dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 57.

Orientasi kekuatan pertahanan Jepang pun mengalami perubahan, dari semula bersifat *deterrent effect oriented* menjadi *response capability oriented*, dimana Jepang meninggalkan sistem pertahanan yang sekedar membela diri, menjadi siap membela diri dengan balas menyerang. Kebijakan ini dianggap perlu, sebagai bentuk pembelaan diri, dan juga untuk tujuan menjaga keamanan Jepang dari serangan luar. Selain itu, Jepang akan turut pula memainkan peran aktifnya, dalam berbagai aktivitas pemeliharaan perdamaian internasional.⁴⁵

Memperhatikan berbagai perubahan strategis yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap kekuatan militernya, terdapat paling tidak, ada tiga poin yang menjadi tujuan utama Jepang.⁴⁶ *Pertama*, garis kebijakan ini merupakan keinginan kuat Jepang, untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat internasional sebagai salah satu kekuatan dunia dalam arti yang sesungguhnya. Jepang tidak hanya ingin dipandang sebagai kekuatan ekonomi, melainkan juga sebagai kekuatan militer dunia. *Kedua*, meskipun Jepang masih menitikberatkan kerjasama aliansi militer dengan Amerika Serikat, melalui perubahan ini, ingin menunjukkan keinginan Jepang, untuk menjaga jarak dengan Amerika Serikat dalam aspek pertahanannya, dan keinginannya untuk terlibat lebih aktif dalam kerjasama keamanan di kawasan Asia Pasifik. *Ketiga*, perubahan kebijakan ini juga, secara sangat jelas ingin menunjukkan rivalitasnya dengan RRC. Kendati pun interaksi ekonomi antara Jepang dan RRC terus mengalami peningkatan, namun hubungan bilateral kedua negara sebetulnya sedang berada pada titik terendah. Gerakan demonstrasi “Anti Jepang” yang muncul di beberapa kota utama RRC, memiliki keterkaitan erat dengan semakin

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 57-58.

meningkatnya ketegangan hubungan antara kedua negara. Hal ini terutama disebabkan, karena kekhawatiran RRC terhadap kembalinya kekuatan militer Jepang di kawasan Asia Timur. Pemicu utama ketegangan adalah ketidakmauan Jepang dalam mengungkap keterlibatan militer Jepang di RRC sesuai fakta sejarah.

Melihat berbagai perkembangan baru di atas, misi dan peran apakah yang dapat dimainkan Jepang dalam memelihara stabilitas keamanan di Asia Timur? Selain memainkan perannya sebagai kekuatan *deterrence* baru di kawasan Asia Timur, Jepang juga dapat memberikan kontribusinya yang lebih tinggi, dalam melindungi keamanan maritim di kawasan ini. Kekuatan maritim *Self Defense Forces* (SDF) dapat melakukan operasi patroli, dan pengawasan yang lebih intensif, baik di sekitar wilayah perairan Jepang, maupun di wilayah lainnya di kawasan Asia Timur,⁴⁷ tak terkecuali di wilayah yang disengketakan antara Jepang dengan RRC dan juga Korea Selatan.

Bila kita telusuri perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang, perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bahkan sejak era restorasi Meiji, tujuan utama kebijakan luar negeri Jepang haruslah bermuara pada pencapaian Jepang sebagai *a wealthy nations and a strong military*.⁴⁸

3. Sasaran Kebijakan

Politik luar negeri Jepang di Asia Timur merupakan formulasi tindakan Jepang, terhadap kondisi lingkungan eksternalnya, yang memberikan kekhawatiran bagi keamanan

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 60-61.

⁴⁸ Sanjana Joshi. (2005). "Japan and Asia", dalam Mahavir Singh (ed.). *Building A New Asia*. New Delhi: Shipra Publications. Hal. 264.

nasionalnya, serta kondisi domestik, yang menginginkan keterlibatan Jepang, dalam merespon krisis keamanan di kawasan Asia Timur, yang menopang formulasi tindakan tersebut. Kebijakan pemerintah Jepang, khususnya di bawah pemerintahan Shinzo Abe, merupakan tindakan dalam memaknai dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pertahanan dalam menjaga keamanan nasional Jepang, serta penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kedaulatan di perairan laut lepas, dengan RRC dan Korea Selatan.

Dalam upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan Jepang, beberapa sasaran kebijakan pemerintahan Shinzo Abe yang baru, antara lain adalah, rencana menambah anggaran pertahanan Jepang sekitar 2 persen, menjadi 53,4 milyar dollar Amerika Serikat. Penambahan alokasi anggaran pertahanan tersebut digunakan antara lain, untuk membiayai penambahan personel angkatan darat Pasukan Bela Diri Jepang, memodernisasi dan membeli sistem persenjataan baru, baik untuk angkatan laut, darat, maupun udara.⁴⁹

Kebijakan tersebut diyakini bakal menjadi salah satu gebrakan Perdana Menteri Shinzo Abe. Dalam sejumlah kesempatan, Shinzo Abe kerap menegaskan akan meningkatkan belanja pertahanan Jepang, untuk mengimbangi perkembangan kekuatan militer RRC yang dipandang agresif. Jepang saat ini tengah mengalami krisis sengketa wilayah di Laut Cina Timur dengan RRC.

Selain peningkatan anggaran pertahanan, pemerintahan Shinzo Abe kemungkinan akan mengembangkan proyek industri pertahanan. Dalam upaya

⁴⁹ Kompas (ed.). "*Jepang Akan Tambah Anggaran Pertahanan.*" Kompas, 7 Januari 2013. Hal. 10.

memperkuat kemampuan pertahanan Jepang, pemerintahan Shinzo Abe akan menerapkan kebijakan pembangunan militer, melalui kebijakan pengembangan industri pertahanan. Industri pertahanan Jepang ini, akan memproduksi peralatan militer, baik untuk angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara, Pasukan Bela Diri Jepang.

Sasaran kebijakan lainnya ialah memformulasi strategi pertahanan Jepang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan postur pertahanan Jepang di kepulauan barat daya, khususnya dalam merespon agresifitas militer RRC, atas sengketa Kepulauan Senkaku, juga dalam upaya mengantisipasi ancaman peluru kendali Korea Utara. Untuk menguatkan postur pertahanan ini, pemerintahan Shinzo Abe, kemungkinan akan menjajaki kerjasama pertahanan dinamis dengan Amerika Serikat, serta kerjasama keamanan berlapis di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat, di bawah pemerintahan partai DPJ, timbul keretakan. Karenanya, harus dipulihkan untuk menstabilkan hubungan Jepang-Amerika Serikat. Selama satu dekade terakhir, aliansi Amerika Serikat-Jepang telah diperkuat dengan berbagai kerjasama militer, namun secara substansial berubah, sebagai respon terhadap berbagai perubahan dalam negeri, serta tantangan internasional yang baru. Sementara kerjasama keamanan berlapis di kawasan Asia-Pasifik dimaksudkan untuk mengurangi ruang gerak RRC, dalam menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik.

Shinzo Abe juga pernah menegaskan bakal mendukung penuh, upaya menginterpretasi ulang Konstitusi Pasifis Jepang, yang disusun setelah Perang Dunia II, terutama untuk melonggarkan sejumlah aturan yang mengekang militer Jepang selama ini.

Shinzo Abe yang pada 2006-2007 lalu menjabat perdana menteri Jepang, ingin merealisasikan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang, karena merasa perlu bagi Jepang, mengembangkan kekuatan militer yang dimilikinya, sebagai akibat dari ancaman yang dirasakannya.

Namun, untuk mengamandemen konstitusi yang ada, pemerintahan Shinzo Abe harus mampu melalui dua tahap seleksi. *Pertama*, mendapatkan persetujuan Parlemen, untuk melakukan referendum amandemen konstitusi. Selanjutnya, *kedua*, mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum, untuk melakukan amandemen konstitusi.⁵⁰

Terkait penyelesaian sengketa wilayah kepulauan Senkaku dan Takeshima, pemerintahan Shinzo Abe kemungkinan menjajaki komunikasi intensif, dengan Korea Selatan. Hal ini terlihat, ketika Shinzo Abe, menjelang dilantik sebagai perdana menteri, memutuskan akan mengirim utusan khusus ke Seoul, sebagai pernyataan sikap positif, untuk memperbaiki hubungan dengan negara tetangga Jepang tersebut. Namun, ia berulang kali menekankan pendirian Jepang, mengenai masalah Kepulauan Senkaku, dengan tetap mempertahankan sikap keras.

Shinzo Abe dianggap berhaluan keras, dan ia sendiri, juga sering menyatakan pendirian berhaluan keras. Namun, setelah memegang tampuk pemerintahan, ia tidak akan segera melaksanakan konsepnya itu, melainkan akan pragmatis dalam menangani masalah nyata. Shinzo Abe tak ingin mengulang kembali kesalahannya, dalam mengambil kebijakan keras, seperti pada periode sebelumnya.

⁵⁰ Wendy Andhika P. (2008). *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*. Hubungan Internasional, Volume IV Nomor 1. Hal. 72.

Shinzo Abe tentu sadar betul, bahwa kesalahan mengambil kebijakan, akan berdampak pada posisinya sebagai perdana menteri, dan dukungan rakyat terhadap posisinya, serta partainya, sebelum pemilu Parlemen Majelis Tinggi, pada Juli 2013 diadakan. Kepemimpinan stabil, ekonomi stagnan, dan takut gagal, akan menjadi prioritas utama sasaran kebijakan Shinzo Abe, di tahun pertama kepemimpinannya.

Di masa awal pemerintahannya ini, Shinzo Abe akan dihadapkan pada persoalan, hubungan bilateral Jepang dengan RRC. Memburuknya hubungan RRC-Jepang disebabkan oleh tindakan nasionalisasi kabinet Yoshihiko Noda, tanpa mempedulikan tentangan keras pemerintah RRC. Bagi kabinet Shinzo Abe, memperbaiki hubungan dengan RRC, akan menjadi ujian dalam perjalanan pemerintahannya ke depan. Dalam memperbaiki hubungan dengan RRC, berpegang pada sikap pragmatis adalah hal yang terpenting bagi pemerintahan Shinzo Abe.

Dalam menangani urusan luar negeri, Shinzo Abe menunjuk Fumio Kishida, seorang pakar Kepulauan Okinawa, sebagai menteri luar negeri Jepang.⁵¹ Penunjukan Fumio Kishida memberi sinyalemen, tentang keseriusan Shinzo Abe dalam menghadapi agresifitas militer RRC, atas Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur, dan strategi operasionalisasi dan mobilisasi pasukan, di pangkalan militer Okinawa, dari kemungkinan-kemungkinan konflik meluas menjadi perang, dengan menunjuk seorang ahli Kepulauan Okinawa, sebagai menteri luar negeri Jepang.

Dalam konteks kebijakan politik luar negeri, Shinzo Abe menekankan keinginannya membuat Jepang, kembali sebagai pemain utama di tingkat dunia. Selama

⁵¹ Kompas (ed.). "*PM Abe Umumkan Kabinet*". Kompas, 27 Desember 2012. Hal. 10.

ini, Jepang dinilai banyak tertinggal, baik secara ekonomi, maupun politik luar negeri, terutama dibandingkan dengan negara tetangganya RRC. Oleh karenanya, masa transisi di kawasan Asia Timur ini, mewajibkan Jepang untuk membangun sistem pada tepat waktu, tanggapan yang tepat terhadap berbagai tantangan, dan merumuskan strategi keamanan jangka menengah dan jangka panjang.

B. Kawasan Asia Timur

1. Arti Penting Kawasan

Asia Timur merupakan kawasan yang berada pada belahan dunia bagian timur. Kawasan ini memainkan peran signifikan semenjak kemajuan ekonomi yang dialami oleh Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan RRC, sehingga menjadikan kawasan ini tumbuh berkembang, dinamis, maju, dan berpengaruh, baik secara geoekonomi, maupun secara geopolitik di dunia. Fenomena keajaiban Asia Timur ini, turut mempengaruhi dinamika politik internasional.

Kemajuan Asia Timur telah mengubah cara pandang, dan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, yang memiliki pengaruh dan kepentingan, baik secara geoekonomi, geopolitik, maupun geostrategi di kawasan ini, utamanya negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan RRC. Amerika Serikat misalnya, pasca kemenangan Barack Obama pada 2008 lalu, melakukan kunjungan resmi kenegaraan melalui Menteri Luar Negeri Hillary Clinton ke Asia Timur, yaitu Jepang, Korea Selatan, RRC, dan juga Indonesia. Sementara itu, Rusia dan RRC, masih tetap mendukung Korea Utara mengembangkan program nuklirnya dan

membentenginya dari setiap sanksi PBB. Di lain pihak, RRC terus menunjukkan agresifitas militernya di perairan Laut Cina Timur, yang membuat Jepang terdorong, untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya, dari kemungkinan ancaman keamanan di kawasan Asia Timur.

Kawasan Asia Timur dewasa ini merupakan kawasan yang ditandai dengan berbagai kontradiksi. Dapat dikatakan bahwa perkembangan strategis di kawasan Asia Timur, selama sepuluh tahun terakhir, cukup kondusif. Di satu sisi, kawasan ini termasuk kawasan yang cukup stabil dan dinamis, sehingga negara-negara di kawasan ini, dapat lebih memusatkan perhatiannya, baik pada upaya pemulihan ekonomi, maupun dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, tak dapat dipungkiri, bahwa kawasan Asia Timur, juga merupakan kawasan yang masih terus ditandai, oleh sisa-sisa persoalan Perang Dingin, seperti masalah di Semenanjung Korea dan status internasional Taiwan.

Kawasan Asia Timur juga masih dibayangi oleh persoalan-persoalan yang merupakan warisan sejarah masa lalu, yang masih menjadi faktor penghambat dalam hubungan antar negara di kawasan ini, seperti dalam hubungan antara Jepang dengan RRC, dan Jepang-Korea Selatan. Di saat yang sama, juga terjadi *strategic realignments* antar negara besar, khususnya dalam hubungan antara Jepang dan RRC.

Di samping itu, Asia Timur juga merupakan kawasan dimana sedang terjadi proses *power shift* (pergeseran kekuatan), yang menjadi ciri utama dari apa yang disebut sebagai “sebuah tata regional yang sedang berkembang” (*a new emerging regional order*). Proses *power shift* di kawasan Asia Timur dalam pandangan Rizal Sukma, seorang analis

politik internasional, ditandai oleh dua kecenderungan besar, yakni kebangkitan RRC, dan revitalisasi peran keamanan Jepang.

Kedua kecenderungan ini memiliki implikasi strategis, terhadap hubungan antar negara besar di kawasan Asia Timur pada umumnya, dan dalam pola perimbangan kekuatan (*balance of power*) diantara mereka pada khususnya.⁵² Kebangkitan RRC sebagai kekuatan baru di kawasan, merupakan fenomena yang paling penting, sebagai *key driver* bagi proses *power shift* tersebut. Seperti dikatakan oleh David Shambaugh, seorang analis politik internasional, yang mengatakan bahwa, “struktur kekuatan dan parameter interaksi, sekarang ini, sedang dipengaruhi secara fundamental, antara lain, oleh meningkatnya kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh politik RRC, serta posisi diplomatik, dan keterlibatan negara itu dalam institusi multilateral regional.”⁵³ Oleh karena itu, karakteristik hubungan antar negara di kawasan Asia Timur dalam dekade mendatang, akan diwarnai oleh respon terhadap kebangkitan RRC ini.

Dalam hal ini, kebangkitan RRC merupakan isu yang paling signifikan bagi masa depan posisi Jepang di kawasan Asia Timur. Tantangan strategis terbesar yang dihadapi Jepang adalah bagaimana merespon, dan mengakomodasi kebangkitan RRC, sehingga negara ini dapat menjadi aktor, dan mitra yang baik, dalam menjamin stabilitas kawasan. Semuanya ini, berpotensi melahirkan sebuah pergeseran kekuatan yang terpenting, sejak Perang Dunia II, dengan segala kemungkinan implikasinya, baik yang positif, maupun negatif. Akibatnya, Asia Timur dihadapkan pada persoalan klasik dalam hubungan

⁵² Rizal Sukma. (2007). *Indonesia, ASEAN dan Tatanan Regional Asia Timur*. Jurnal Luar Negeri, Volume 24, Nomor 3, September-Desember 2007. Jakarta: BPPK Kemlu RI. Hal. 57-58.

⁵³ David Shambaugh. (2005). “*The Rise of China and Asia’s New Dynamics*”. Dalam David Shambaugh (ed.). *Power Shift: China and Asia’s New Dynamics*. Barkeley: University of California Press. Hal. 1.

internasional, yakni bagaimana merespon dan mengelola kelahiran kekuatan baru di kawasan.⁵⁴

2. Masalah-masalah Kawasan

Dalam satu tahun terakhir ini, isu krisis keamanan dan politik di kawasan Asia Timur, merupakan bahan pembicaraan utama yang ramai dibicarakan oleh masyarakat internasional. Dari beragam krisis yang terjadi, krisis Semenanjung Korea, dan ketegangan di Laut Cina Timur, menjadi pusat perhatian dunia, dan isu sentral di kawasan Asia Timur.

Krisis Semenanjung Korea merupakan jenis krisis politik, yang berimplikasi kepada keamanan, yang dapat berujung pada perang. Konflik Korea pada dasarnya merupakan perjuangan antara kedua bagian dari negara yang terpecah, yang penggabungan kembali bangsa tersebut, begitu sulit, karena dirintangi oleh perbedaan-perbedaan tajam, dan sering menyakitkan, antara rezim, dan sistem sosial kedua belah pihak, yang saling pengaruh-mempengaruhi. Selain itu, dalam analisa Walter S. Jones, seorang ahli hubungan internasional ini, memandang masalah Korea merupakan masalah yang menyangkut kepentingan dunia, karena letak strategisnya yang menjadi jembatan, atau koridor yang strategis, antara RRC-Rusia, dan Jepang-Amerika Serikat.⁵⁵

Ketegangan di Semenanjung Korea bukanlah semata antara Korea Utara dan Korea Selatan, melainkan juga melibatkan Amerika Serikat dan RRC. Korea Selatan dan Korea Utara merupakan wilayah yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan RRC, sebagai wilayah persaingan ideologi, dan kepentingan masing-masing, dalam politik

⁵⁴ Rizal Sukma. *Loc Cit.* Hal. 59.

⁵⁵ Walter S. Jones. 1993. *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 93.

global. Dari sudut pandang geopolitik dan geostrategi, Semenanjung Korea merupakan wilayah strategis bagi keduanya, dimana Korea Utara adalah daerah penyangga untuk RRC, sementara Korea Selatan adalah daerah penyangga untuk sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik.

Kenyataan ini dapat dilihat dari dukungan RRC terhadap perkembangan nuklir Korea Utara di panggung internasional. Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB), RRC selalu membela Korea Utara, dan menggunakan hak vetonya dalam menghalangi setiap sanksi terhadap Korea Utara. Sementara itu, dukungan militer Amerika Serikat terhadap Korea Selatan, dapat dilihat dari kegiatan latihan militer bersama, antara pasukan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang digelar sebagai reaksi, terhadap keberhasilan Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh Unha-3, pada 12 Desember 2012 lalu.

Sementara itu, kawasan Laut Cina Timur merupakan area strategis yang mempertemukan Jepang, RRC, dan Korea Selatan. Kawasan ini memiliki rantai pulau yang kini menjadi objek sengketa antara Jepang dengan RRC, dan juga Jepang dengan Korea Selatan di Laut Jepang. Pada satu tahun terakhir ini, sengketa teritorial di kawasan Laut Cina Timur meningkat, dengan konfrontasi antara Jepang dan RRC atas kepulauan Senkaku/Diaoyu, yang mengintensifkan ke level paling berbahaya sampai saat ini. Ketegangan juga terjadi antara Korea Selatan dan Jepang atas kepulauan Takeshima/Dokdo di Laut Jepang. Namun, langkah ini juga bisa dilihat, sebagai bentuk provokatif oleh RRC, dan Korea Selatan, dua korban Jepang dalam Perang Dunia II, era kebijakan militeristik.

Kepulauan yang disebut Senkaku oleh Jepang atau Diaoyu menurut RRC itu, menjadi titik panas hubungan kedua negara. Situasi memanas terutama setelah pemerintah Jepang membeli tiga pulau di kawasan itu, dari seorang pemilik pribadi di Jepang, pada September 2012 lalu. Hal itu langsung memicu aksi protes anti-Jepang besar-besaran di RRC, yang sempat mengganggu hubungan dagang kedua negara. Pemerintah RRC merespon dengan menerbangkan pesawat patroli kelautan Y-12, memasuki wilayah udara Kepulauan Senkaku/Diaoyu, yang disengketakan kedua negara, pada 13 Desember 2012 lalu. Jepang pun langsung bereaksi, dengan menerbangkan delapan pesawat tempur F-15 Eagle, dimana empat diantaranya langsung terbang ke kawasan sengketa, namun pesawat RRC sudah pergi. Insiden tersebut terjadi, bertepatan dengan peringatan 75 tahun tragedi “Pembantaian Nanjing” yang dilakukan militer Jepang di RRC, pada 13 Desember 1937.

Insiden tersebut memicu perdebatan di tingkat domestik yang intens mengenai kelemahan Jepang dalam menghadapi tekanan RRC. Skeptisisme publik terhadap niat pemerintah RRC ditambah dengan munculnya pengaruh RRC yang semakin mengkhawatirkan masyarakat Jepang, menimbulkan keraguan publik tentang kemampuan Jepang dalam mengelola hubungan dengan RRC.⁵⁶

Akhirnya, Tokyo beralih ke Washington untuk mencari dukungan dalam hubungan dengan Beijing. Alhasil, Jepang berhasil membujuk Amerika Serikat, untuk menggelar latihan perang skala besar di sekitar Okinawa, dekat perairan yang disengketakan antara RRC dan Jepang, pada 5 November 2012 lalu. Lebih dari 45.000 tentara Amerika Serikat, dan Jepang, mengikuti latihan perang hingga 16 November 2012,

⁵⁶ Sheila A. Smith. (2013). *Japan, China and the Tide of Nationalism*. <http://www.cfr.org/asia/japan-china-tide-nationalism/p29080>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.30 WITA.

yang diberi nama Keen Sword. Latihan perang melibatkan operasi angkatan udara, dan angkatan laut, di sekitar Okinawa, sebelah utara dari kepulauan yang diklaim oleh Jepang dan RRC.⁵⁷

Tindakan Jepang ini menjadi bukti keseriusan Jepang, dalam mempertahankan kedaulatannya atas kepulauan Senkaku/Diaoyu, yang diklaim oleh RRC, dan hubungan kerjasama pertahanan yang erat, antara Jepang dan Amerika Serikat. Kepulauan yang disebut Senkaku di Jepang, dan Diaoyu di China itu, menyebabkan kedua negara mengalami kebuntuan diplomatik.

Perkembangan yang menarik dari indikasi kebangkitan militer Jepang adalah persaingan militer strategis Jepang dengan RRC, yang bisa membahayakan stabilitas keamanan Asia Timur di masa depan. Menurut Tinjauan Chen Dongxiao, analis kajian Asia Pasifik, pada *Institute of Southeast Asian Studies*, Singapura, “persaingan militer Jepang-RRC, berada diantara dua masalah, yaitu antara perimbangan kekuatan, atau perimbangan ancaman.”⁵⁸ Sulit dibayangkan apa yang akan terjadi, apabila Jepang dan RRC tidak dapat menahan diri, dan membiarkan bentrokan terjadi. Begitu pula dengan Korea Selatan, yang berani menantang Jepang dalam sengketa wilayah Kepulauan Dokdo/Takeshima. Keberanian Korea Selatan itu, disuarakan pada saat Korea Selatan sesungguhnya memerlukan dukungan Jepang, dalam menghadapi Korea Utara, yang mengancam akan menggunakan senjata nuklir.

⁵⁷ Ervan Hardoko. *Loc Cit.*

⁵⁸ Chen Dongxiao. (2003). *The Constructivist Challenge to the Debate on East Asian Security in the New Century*. Dalam David W. Lovell. *Asia-Pacific Security: Policy Challenges*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Hal. 168-169.

Kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, sangat ditentukan oleh bagaimana sikap, peran, dan pengaruh, serta hubungan kerjasama, dan kebijakan politik luar negeri, negara-negara di kawasan ini, dalam menyikapi krisis Semenanjung Korea, dan ketegangan di Laut Cina Timur. Apabila hubungan antara RRC, Korea Selatan, dan Jepang terganggu, maka kerjasama ketiga negara tersebut, dalam meredam perkembangan nuklir Korea Utara, dan memelihara stabilitas keamanan di Asia Timur pun, akan terganggu. Kompleksitas sejarah antara Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Korea Utara, memang sulit dihindari. Dalam kaitan itulah, Jepang harus berhati-hati dalam merumuskan, dan menerapkan kebijakan politik luar negeri, dan pertahanannya.

BAB IV
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG DI ASIA TIMUR
DI BAWAH PEMERINTAHAN SHINZO ABE

A. Peningkatan Kapabilitas Pertahanan

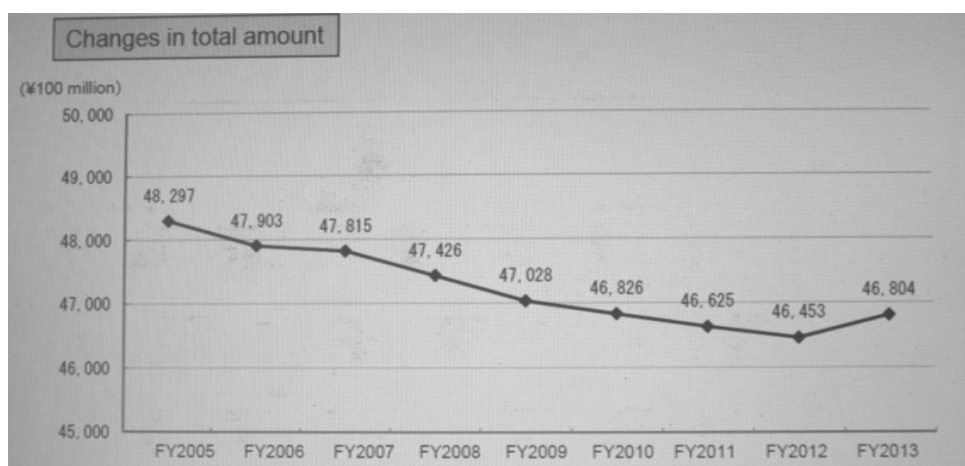
Kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur merupakan tindakan Jepang, dalam merespon dinamika hubungan internasional di lingkungan sekitar Jepang, yang memberikan kekhawatiran bagi keamanan nasional dan kedaulatannya, serta kondisi domestik, yang menginginkan keterlibatan Jepang, dalam merespon krisis keamanan di kawasan Asia Timur. Kebijakan pemerintah Jepang, khususnya di bawah pemerintahan Shinzo Abe, merupakan tindakan dalam memaknai dinamika tersebut, dengan menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pertahanan.

Peningkatan kapabilitas pertahanan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintahan Shinzo Abe, selain pemulihan ekonomi, stabilitas pemerintahan, dan penyelesaian sengketa wilayah kepulauan di Laut Cina Timur. Kebijakan ini didorong oleh semakin meningkatnya ketegangan yang ditimbulkan oleh lingkungan keamanan di sekeliling Jepang. Dalam periode kedua pemerintahannya ini, Shinzo Abe akan mengambil dan menerapkan beberapa kebijakan strategis, dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang, pemerintahan Shinzo Abe telah menyetujui penambahan anggaran pertahanan Jepang sebesar 0,8 persen, dari ¥ 46.453 milyar menjadi ¥ 46.804 milyar.⁵⁹ Media Jepang menyebutkan, bahwa penambahan alokasi anggaran pertahanan tersebut, digunakan antara

⁵⁹ Ministry of Defense. (2013). *Defense Programs and Budget of Japan – Overview of FY2013 Budget*. www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf. Diakses pada 26 Desember 2013, pukul 11.11 WITA.

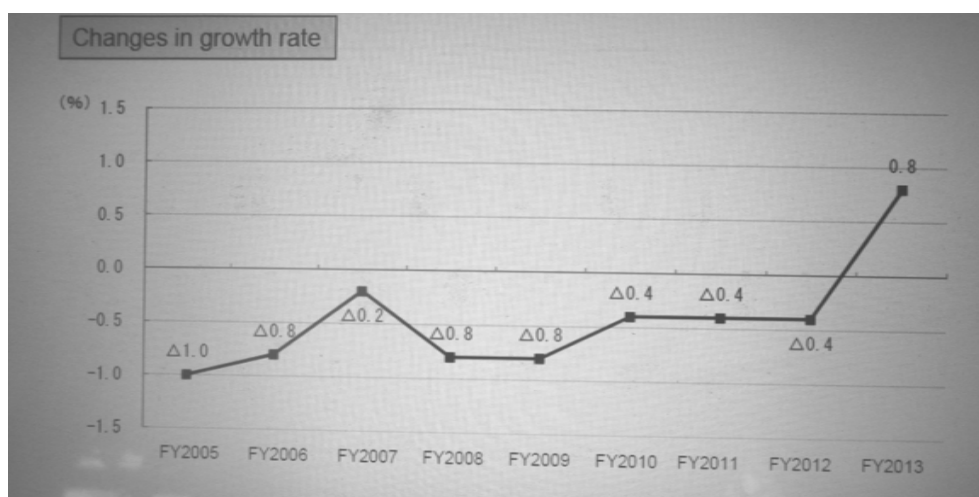
lain, untuk membiayai penambahan personel angkatan darat Pasukan Bela Diri Jepang. Selain itu, juga untuk memodernisasi dan membeli sistem persenjataan baru, baik untuk angkatan laut, darat, maupun udara.⁶⁰

Gambar 1. Grafik Perubahan Anggaran Pertahanan Jepang dari Tahun Fiskal 2005-2013



Sumber : www.mod.gp.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf

Gambar 2. Grafik Perubahan Persentase Anggaran Pertahanan Jepang dari Tahun Fiskal 2005-2013



Sumber : www.mod.gp.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf

Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, menyatakan akan menambah jumlah personel militer Jepang sebanyak 287 orang, pada tahun fiskal mendatang.

⁶⁰ Kompas, 7 Januari 2013. *Loc Cit.*

Penambahan itu hanya sekitar 0,1 persen, dari jumlah personel militer Jepang saat ini, sebanyak 225.000 orang. Meski jumlahnya kecil, rencana penambahan personel militer tersebut, sangat berarti bagi pertahanan Jepang, apalagi Itsunori Onodera secara spesifik menyebut penambahan personel itu, akan digunakan untuk meningkatkan penjagaan di kawasan barat daya Jepang. Kawasan tersebut kini menjadi lokasi sengketa wilayah, antara Jepang dengan RRC atas kepulauan Senkaku, yang oleh RRC disebut Diaoyu.⁶¹

Itsunori Onodera juga mengatakan bahwa anggaran pertahanan meningkat sekitar 0,8 persen, mencapai 40 miliar Yen atau sekitar US\$ 440 juta. Kenaikan ini merupakan yang pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir.⁶² Hal ini menjadi bukti pernyataan Shinzo Abe, yang dalam beberapa kesempatan, kerap menegaskan akan meningkatkan anggaran dan belanja pertahanan Jepang, guna mengimbangi pertumbuhan kekuatan militer RRC, yang dipandang agresif, dan kemungkinan mempersiapkan diri, dalam menghadapi serangan nuklir Korea Utara, yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Penambahan anggaran pertahanan dan personel militer Jepang tersebut, tidak dapat dipungkiri merupakan reaksi Jepang, terhadap meningkatnya kekuatan militer RRC, serta respon terhadap kemajuan pengembangan nuklir Korea Utara. Kondisi ini pula, yang telah mengubah persepsi ancaman Jepang, terhadap keamanan nasional dan kedaulatannya. Bila sebelumnya Jepang menghindari untuk menyebut RRC dan Korea Utara secara eksplisit sebagai ancaman utamanya, kini Jepang untuk pertama kalinya

⁶¹ Kompas (ed.). "*Jepang Menambah Tentara, China Uji Coba Pesawat*". Kompas, 29 Januari 2013. Hal. 10.

⁶² The Jakarta Post (ed.). "*Japan to Boost Military Headcount Amid China Island Dispute*". The Jakarta Post, 28 Januari 2013.

secara tegas menyebutkan RRC dan Korea Utara, sebagai ancaman militer terbesar bagi Jepang.

Kedua negara ini adalah negara yang bukan hanya memiliki kekuatan militer konvensional yang cukup kuat, melainkan juga dilengkapi dengan kapabilitas nuklir (*military power with nuclear capability*). Program peningkatan kapabilitas militer RRC, dan pengembangan program nuklir Korea Utara, dapat menimbulkan ancaman bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Oleh karena itu, RRC dan Korea Utara bagi Jepang, merupakan “*major destabilizing factors*” di kawasan Asia Timur, dan sedapat mungkin bagi Jepang, ingin menjaga “*balance of power*” di kawasan.

Dalam kebijakan pertahanan Jepang, RRC digambarkan sebagai “*China, which has significant influence on the region’s security, is pushing forward its nuclear, and missile capabilities, and modernization of its navy and air force*”. Sementara Korea Utara disebutkan sebagai “*a significantly unstable factor in regional security, and a serious problem for global nonproliferation efforts.*”⁶³

Adanya persepsi ancaman tersebut, merupakan bagian dari model aksi-reaksi. Model aksi-reaksi ini beranggapan bahwa negara-negara memperkuat sistem persenjataan mereka, karena apa yang mereka anggap sebagai adanya persepsi ancaman (*threat perception*) dari luar. Dengan demikian, model ini mengandalkan penalarannya pada ancaman dari luar, sehingga pola pendekatan tradisional ini, akan berefek pada pembangunan militer.

⁶³ Anak Agung Banyu Perwita. *Loc Cit.* Hal. 56-57.

Pembangunan militer merupakan pengembangan strategi pertahanan nasional suatu negara, atas dasar pertahanan aktif yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, Jepang menyadari pentingnya pertahanan nasional, yang meliputi darat, laut, dan udara, untuk menjaga keamanan nasionalnya. Pembangunan militer ini ditujukan, untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional Jepang. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, bahwa kenaikan anggaran pertahanan Jepang, hanya ditujukan untuk pertahanan dan keamanan nasional Jepang, serta modernisasi dalam perlengkapan militer yang sudah usang.

Dalam upaya memperkuat kemampuan pertahanan Jepang, pemerintahan Shinzo Abe menerapkan pembangunan militer, melalui kebijakan pengembangan industri pertahanan. Industri pertahanan Jepang ini, mulai memproduksi peralatan militer. Salah satu hasil pengembangan industri militer Jepang tersebut ialah pesawat militer jenis Amfibi US-2. Pesawat militer tersebut didesain dan diproduksi secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan angkatan udara Pasukan Bela Diri Jepang. Namun seiring perubahan kepemimpinan, serta mencermati dinamika hubungan internasional di sekeliling Jepang, pesawat militer tersebut mulai diproduksi secara massal. Bahkan pemerintahan Shinzo Abe, mulai menerapkan kebijakan mengalihkan teknologi militer ke keperluan sipil, agar mampu diekspor.

Salah satu bentuk kebijakan Shinzo Abe tersebut ialah tercapainya kesepakatan jual beli pesawat militer jenis Amfibi US-2, dari pemerintah Jepang kepada pemerintah India. Kesepakatan jual beli pesawat militer tersebut, ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri India Manmohan Singh, saat menggelar pertemuan puncak dengan

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo, pada 29 Mei 2013.⁶⁴ Manmohan Singh melakukan kunjungan selama empat hari di Jepang, yang antara lain berisi pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, untuk mempererat kemitraan strategis dan global kedua negara. Penjualan peralatan militer ini juga, menandai penguatan hubungan kerjasama strategis Jepang-India. Baik Jepang maupun India, sama-sama memandang kebangkitan RRC di bidang ekonomi dan militer, sebagai ancaman terhadap stabilitas regional.

Pesawat Amfibi jenis US-2 selama ini hanya diproduksi untuk keperluan Pasukan Bela Diri Jepang. Pesawat tersebut dilaporkan memiliki daya jelajah hingga 4.700 kilometer, dan mampu mendarat di laut dalam kondisi gelombang laut mencapai 3 meter. Menurut Nikkei, India telah menyatakan berminat membeli sedikitnya 15 unit pesawat Amfibi US-2 tersebut.⁶⁵ Sementara Jepang belakangan ini, memang diketahui tengah memperluas pasar senjata buatannya agar mampu diekspor.

Kesepakatan ini juga, akan menandai untuk pertama kalinya, Jepang kembali mengekspor peralatan militernya dalam bentuk utuh ke negara lain, setelah menerapkan larangan ekspor produk persenjataan pada 1967. Larangan ekspor senjata itu diterapkan sendiri oleh Jepang, sebagai bagian dari usaha menjauh dari militerisme, setelah Perang Dunia II berakhir. Namun, pada 2011, pemerintah Jepang mengendurkan larangan tersebut, yang memungkinkan para pelaku industri militer di Jepang, berpartisipasi dalam proyek persenjataan multinasional.

⁶⁴ Kompas (ed.). "*Jepang Jual Pesawat Militer.*" Kompas, 28 Mei 2013. Hal. 8.

⁶⁵ *Ibid.*

Selain pengembangan industri pertahanan, pemerintah Jepang juga akan terus mengembangkan sistem pertahanan senjata balistiknya. Jepang sendiri telah melakukan studi mengenai sistem pertahanan senjata balistik ini, sejak Korea Utara berhasil melakukan uji coba senjata balistik Taepo-Dong, ke bagian utara pulau Honshu Jepang, pada Agustus 1998.⁶⁶

Pada 1999, Jepang segera memulai penelitian bersama dengan Amerika Serikat, dalam pengembangan sistem pertahanan senjata balistiknya, dan pada 2003, Jepang mengumumkan keberhasilannya dalam pengembangan sistem pertahanan senjata balistik multilapis, yang dikombinasikan dengan kemampuan senjata balistik laut Aegis, dan senjata balistik darat yang dikenal sebagai *Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) system*.⁶⁷

Pengembangan sistem pertahanan senjata balistik ini mencapai titik puncak, tatkala Jepang berhasil meluncurkan dua satelit keluar angkasa, pada 27 Januari 2013. Salah satu satelitnya dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas pengumpulan informasi, untuk kepentingan intelijen negara. Jepang meluncurkan satelit mata-mata, untuk keperluan pertahanan pemerintah, dan badan-badan intelijen, yang dirancang untuk melacak aktivitas militer Korea Utara.

Peluncuran roket Jepang ini datang sebulan setelah Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak jauh, pada 12 Desember 2012 lalu, yang terbang di atas pulau-pulau

⁶⁶ Anak Agung Banyu Perwita. *Loc Cit.* Hal. 60.

⁶⁷ *Ibid.*

selatan Okinawa Jepang. Roket H-2A lepas landas dari *Tanegashima Space Center*, lokasi peluncuran utama Jepang, yang terletak di sebuah pulau di wilayah barat daya Jepang.⁶⁸

Satu satelit lainnya dilengkapi dengan sistem radar. Sistem ini dikatakan dapat memberikan Tokyo, kemampuan memantau setiap lokasi di bumi, setidaknya sekali sehari, dan mampu mendeteksi benda-benda di tanah sekecil satu meter persegi, bahkan di malam hari dan melalui awan. *The Japan Aerospace Exploration Agency* mengatakan, satelit yang diluncurkan tersebut menampilkan teknologi optik eksperimental. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memuji uji coba yang sukses tersebut, sebagai bentuk peningkatan “keamanan nasional negara dan manajemen krisis.”⁶⁹

Peluncuran satelit ini juga menjadi pertanda akan keseriusan Jepang dalam mengembangkan dan memodernisasi sistem pertahanannya, guna mengantisipasi ancaman rudal Korea Utara. Dalam upaya merespon ancaman rudal Korea Utara, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan *Ballistic Missile Defence* (BMD). Jepang terus memperkuat sistem BMD ini sejak Korea Utara meluncurkan rudal yang disebut “satelit” pada April dan Desember 2012 lalu. Departemen Pertahanan Jepang telah mengerahkan 4 kapal perusak Aegis yang dilengkapi dengan rudal SM-3, dan 16 rudal Patriot PAC-3, serta memperkuat kemampuan radar dengan memasang 4 situs radar FPS-5 dan peningkatan 7 situs radar FPS-3 di wilayah Okinawa dan kepulauan Sakishima.⁷⁰ Penempatan sistem pertahanan rudal itu dilakukan untuk memperkuat perlindungan dalam menghadapi

⁶⁸ Stephen Clark. (2013). *Japan Launches Spy Satellites Into Orbit*. <http://www.space.com/19503-japan-spy-satellites-launch.html>. Diakses pada 15 November 2013, pukul 09.05 WITA.

⁶⁹ Dw (ed.). (2013). *Japan Launches New Spy Satellite*. <http://www.dw.de/japan-launches-new-spy-satellite/a-16553451>. Diakses pada 15 November 2013, pukul 09.04 WITA.

⁷⁰ The National Institute for Defense Studies (ed.). (2013). *East Asian Strategic Review 2013*. Tokyo: The Japan Times. Hal. 109-112.

kemungkinan serangan. Melalui kebijakan ini, lintasan rudal balistik dapat dilacak oleh kapal perusak Aegis Jepang, dan pergerakan setiap kapal mampu terdeteksi oleh pesawat patroli maritim Jepang. Hal ini tentunya menjadi informasi yang berguna bagi sistem pertahanan Jepang.

Sebagai bagian integral dari modernisasi pertahanannya, Jepang juga akan menyederhanakan struktur kekuatan pertahanannya, menjadi “*a multifunctional, flexible, and effective force*” dengan kemampuan tempur untuk menghadapi ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi. Secara singkat, kekuatan militer Jepang akan memiliki kemampuan tempur yang sangat efisien, dengan kemampuan teknologi pertahanan tercanggih di dunia.⁷¹

Ancaman Korea Utara membuat Jepang menyadari, bahwa musuh potensial dapat mendatangkan kerusakan serius, tanpa menginjakkan kaki di tanah Jepang. Menyadari hal ini, mantan kepala JDA, Shinjo Shigeru menyinggung gagasan serangan *pre-emptive*, jika peluncuran rudal Korea Utara melawan Jepang, sudah dekat. Sifat ancaman keamanan telah berubah sedemikian rupa, sehingga Jepang tidak memiliki kemewahan menunggu, untuk menghadapi musuh di pantainya. Dalam hal ini, *grand strategy* membutuhkan peningkatan kemampuan pertahanan Jepang, dalam menangani ancaman rudal. Selain itu, pemerintah Jepang juga mengambil langkah-langkah perbaikan untuk merampingkan, dan meningkatkan efektivitas pertahanan Jepang, dalam keadaan darurat.⁷²

⁷¹ Sanjana Joshi. *Op Cit.* Hal. 265.

⁷² Siew-Mun Tang. (2007). *Japan's Security Renaissance: Evolution or Revolution?* Journal of International and Area Studies, Volume 14 Nomor 1. Seoul: Seoul National University Press. Hal. 24.

Sementara itu, dalam upaya mengimbangi keberadaan angkatan laut RRC, yang semakin intensif beroperasi di Laut Cina Timur, di sekitar wilayah sengketa kepulauan Senkaku, pemerintahan Shinzo Abe menerapkan kebijakan penguatan postur pertahanan di kepulauan barat daya. Penguatan postur pertahanan di kepulauan barat daya Jepang, meliputi pengawasan pergerakan kapal dan pesawat udara asing, di sekitar pulau-pulau yang dimiliki Jepang, melalui penempatan sistem radar, dan operasi rutin SDF, dan Penjaga Pantai Jepang, dalam mencegah serangan terhadap sebuah pulau lepas pantai, atau wilayah lain Jepang.⁷³

Penguatan sistem radar ini sangat diperlukan Jepang, dalam mengontrol wilayah pulau-pulau lepas pantai Jepang, khususnya di kepulauan barat daya, yang kini disengketakan dengan RRC. Sejumlah kapal pengawas kelautan dan pesawat RRC, kerap terdeteksi masuk keluar wilayah tersebut. Jepang beberapa kali dikabarkan mengerahkan sejumlah jet tempur F-15, untuk mengusir pesawat RRC. Pihak RRC dikabarkan juga, pernah mengerahkan sejumlah jet tempur J-10, untuk membayangi jet-jet tempur Jepang tersebut.

Keseriusan pemerintahan Shinzo Abe dalam meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang, merupakan respon terhadap ancaman keamanan nasional yang dirasakannya. Ancaman keamanan itu datang dari negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur. Ancaman rudal dan pengembangan nuklir Korea Utara, serta kemajuan pesat teknologi pertahanan dan agresifitas militer RRC di Laut Cina Timur, telah menyadarkan Jepang untuk mereformulasi kebijakan pertahanan dan politik luar negerinya.

⁷³ The National Institute for Defense Studies (ed.). *Op Cit.* Hal. 106.

Gambar 3. Peta Penempatan Unit SDF (Pasukan Bela Diri) Jepang di Wilayah Barat Daya Jepang



Sumber : www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf

Dalam menghadapi ancaman keamanan Jepang tersebut, pemerintahan Shinzo Abe tetap mempertahankan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat. Selama satu dekade terakhir, aliansi Amerika Serikat-Jepang telah diperkuat, namun secara substansial berubah, sebagai respon terhadap berbagai perubahan dalam negeri dan tantangan internasional yang baru. Dalam hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat, di bawah pemerintahan partai DPJ, timbul keretakan. Karenanya, dalam pemerintahan LDP ini, harus dipulihkan untuk menstabilkan kembali hubungan Jepang-Amerika Serikat.

Di bawah pemerintahan Shinzo Abe, aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat sangat diperlukan, khususnya dalam merespon ancaman rudal Korea Utara, dan agresifitas militer RRC di Laut Cina Timur, yang mengancam keamanan Jepang. Sebagai mitra dan sekutu utama Amerika Serikat di Asia Timur, Jepang memerlukan keterlibatan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman tersebut. Keterlibatan Amerika Serikat diperlukan,

baik dalam bentuk perlindungan keamanan, maupun dalam upaya persetujuan perubahan Pasal 96, dalam upaya merevisi Pasal 9 Konstitusi Jepang.

Upaya ini kemudian coba dirintis oleh Menteri Luar Negeri Fumio Kishida, dan Menteri Pertahanan Itsunori Onodera, yang mewakili Jepang, dalam pertemuan Komite Konsultatif Keamanan, atau biasa disebut pertemuan dua plus dua, dengan Menteri Luar Negeri John Kerry, dan Menteri Pertahanan Chuck Hagel, yang mewakili Amerika Serikat, pada 3 Oktober 2013 di Tokyo, guna membicarakan tentang perlunya rekonsiliasi, dan penguatan aliansi, antara Jepang dengan Amerika Serikat.⁷⁴ Pertemuan ini juga memberi indikasi awal diplomasi Jepang, dalam mendapatkan persetujuan amandemen konstitusi, dan aliansi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer RRC, dan rudal Korea Utara.

Bahkan sebelumnya, Pasukan Bela Diri Jepang, dan US Army, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, juga telah meningkatkan kerjasama militer. Pada bulan Juni 2013, latihan bersama diadakan di California, termasuk didalamnya, pelatihan pendaratan baru pesawat Tiltrotor Osprey MV-22 pada kapal perusak Jepang. Kedua pemimpin negara pun, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, telah bertemu di *White House*, guna membahas konstelasi politik dan strategi pertahanan di kawasan Asia Timur.⁷⁵

Selain menguatkan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, pemerintahan Shinzo Abe juga menjajaki kerjasama keamanan berlapis di Asia-Pasifik. Hal ini terlihat

⁷⁴ Takashi Oshima, dkk. (2013). “*Analisis: Jepang Berusaha Sikap Keras, AS Mendorong Kerjasama Dalam Berurusan dengan Cina.*” Asahi Shimbun, 4 Oktober 2013.

⁷⁵ Dmitry Streltsov. (2013). “*Abe’s Changing Security Policy.*” <http://www.eastasiaforum.org/2013/07/19/abes-changing-security-policy/>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 12.47 WITA.

jelas, dari perjalanan Shinzo Abe, ke negara-negara Asia Tenggara pasca pelantikannya sebagai perdana menteri Jepang. Shinzo Abe melakukan perjalanan ke Indonesia, Thailand, dan Vietnam, pada Januari 2013, lalu Myanmar pada Mei 2013, dan kemudian Malaysia, Singapura, dan Filipina, pada Juli 2013.⁷⁶ Banyak pengamat menafsirkan kunjungan Shinzo Abe tersebut, sebagai strategi dalam melawan RRC. Namun, dapat dikatakan bahwa motif utama dari diplomasi ini adalah campuran dari kedua kepentingan Jepang, yaitu komersial dan strategis.

Kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai pengganti “kehilangan” pasar Cina dari sisi komersial, sedangkan dari sisi strategis, kawasan Asia Tenggara menjadi penting sebagai penghubung dua lautan. Keamanan dan stabilitas di Lautan Pasifik sampai Lautan Hindia, menjadi krusial bagi kelangsungan ekonomi dan perdagangan Jepang. Aliansi strategis antara Jepang-Amerika Serikat-ASEAN-Australia-India dianggap sebagai proyeksi kekuatan strategis membentuk pertemuan kedua lautan tersebut. Namun, juga dapat dilihat sebagai strategi mengepung RRC.

Kebijakan peningkatan anggaran pertahanan, pengembangan industri pertahanan, strategi pertahanan, dan kerjasama pertahanan, yang dilakukan oleh pemerintahan Shinzo Abe, semakin menguatkan indikasi kebangkitan kembali militerisme Jepang. Padahal, kebijakan-kebijakan ini sangat bertentangan dari keberadaan Konstitusi Jepang. Namun, bila memperhatikan kemajuan besar pertahanan negara-negara di lingkungan sekitar Jepang, dalam satu dekade terakhir, membuat Jepang mengalami dilema keamanan. Di satu sisi Jepang membutuhkan kekuatan militernya, untuk melindungi negaranya dari

⁷⁶ Dennis D. Trinidad. (2013). *Abe's ASEAN Tour*.
<http://www.eastasiaforum.org/2013/09/06/abes-asean-tour/>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 12.51 WITA.

ancaman-ancaman dari luar, namun di sisi lain, adanya pembatasan dari Konstitusi Jepang yang telah dibuat, yang membatasi kebangkitan militernya.

Pada periode pemerintahannya yang kedua ini, Shinzo Abe bakal mendukung penuh, upaya menginterpretasi ulang Konstitusi Pasifik Jepang, yang disusun setelah Perang Dunia II, terutama untuk melonggarkan sejumlah aturan yang mengekang militer Jepang selama ini, meskipun akan menuai kontroversi dalam negeri, dan aksi protes keras dari negara-negara tetangganya. Namun Shinzo Abe akan sangat berhati-hati melakukannya, setelah kebijakan *Abenomic* berhasil, dan stabilitas pemerintahannya tercapai, serta mampu mendapatkan dukungan suara mayoritas, di Parlemen Majelis Tinggi.

Kebijakan *Abenomic*, selain sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi Jepang, juga diharapkan memberi pengaruh dan menarik simpati pada para pemilih di Jepang, terhadap kebijakan Shinzo Abe dan partainya LDP. Dalam *Abenomic*, Shinzo Abe membuat kebijakan fiskal yang lebih longgar untuk memotong deflasi, memberi paket stimulus senilai 116 juta US\$, dan mencetak lebih banyak Yen, sehingga memperendah nilai tukar mata uang Yen terhadap Dolar, guna membuat ekspor Jepang kembali kompetitif. Kebijakan ini berhasil mengakhiri stagnasi ekonomi yang dialami Jepang beberapa tahun terakhir. Jepang mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 0,9 persen pada kuartal I – 2013. Ini membuat Jepang secara resmi keluar dari resesi setelah satu dekade mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif. Kondisi ini juga memberi harapan bagi Jepang, untuk kembali ke posisi yang diambil alih ‘musuh historisnya’ RRC, dengan pertumbuhan kedua tertinggi di dunia.

Terkait isu amandemen konstitusi, sebenarnya Shinzo Abe yang pada 2006-2007 lalu menjabat perdana menteri Jepang, ingin merealisasikan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang, karena merasa perlu bagi Jepang, mengembangkan kekuatan militer yang dimilikinya, sebagai akibat dari ancaman yang dirasakannya. Namun, untuk mengamandemen konstitusi yang ada, pemerintahan Shinzo Abe harus mampu melalui dua tahap seleksi. *Pertama*, mendapatkan persetujuan Parlemen, untuk melakukan referendum amandemen konstitusi. Selanjutnya, *kedua*, mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum, untuk melakukan amandemen konstitusi. Namun, kenyataannya, Shinzo Abe terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan partainya LDP, kalah telak dalam pemilu parlemen selanjutnya.

Kini, setelah LDP bersama mitra koalisinya New Komeito meraih dukungan 76 dari 121 kursi yang diperebutkan dalam pemilu Majelis Tinggi, pada 21 Juli 2013, yang memberikan total sekitar 325 dari 480 kursi di Parlemen,⁷⁷ langkah menuju amandemen itu mendapati jalan. Dalam pandangan Purnendra Jain, seorang profesor di *Asian Studies Adelaide University*, hal ini akan menjadi lebih menantang bagi LDP untuk mempertahankan keuntungan pemilihannya, jika Shinzo Abe penuh semangat mengejar agenda nasionalis dan mencoba untuk merevisi konstitusi dengan tujuan mengubah klausa pasifis Pasal 9.⁷⁸

Kemenangan partai pengusung Shinzo Abe dalam pemilihan Majelis Tinggi, pada 21 Juli lalu, kian memperkuat kemenangan yang diraih dalam pemilu Majelis

⁷⁷ John Swenson-Wright. (2013). "Viewpoint: What Upper House Victory Means for Shinzo Abe." <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23401469>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 13.01 WITA.

⁷⁸ Purnendra Jain. (2013). "Japan After Electoral Success, Now Comes the Hard Part of Abe." <http://www.eastasiaforum.org/2013/07/25/japan-after-electoral-success-now-comes-the-hard-part-for-abe/>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 13.13 WITA.

Rendah, akhir Desember 2012, memberi jalan bagi Shinzo Abe, dalam menerapkan kebijakan yang diinginkan, terutama amandemen konstitusi. Langkah Shinzo Abe dalam merealisasikan ambisinya ini, bukan hal mustahil baginya, malahan semakin terbuka. Apalagi, dukungan anggota parlemen semakin mendekati langkah amandemen. Hal ini diperlihatkan oleh 168 anggota Parlemen Jepang dari partai konservatif, yang mengunjungi Kuil Yasukuni, simbol agresi militer Jepang tersebut, pada 23 April 2013 lalu.

Bukan tak mungkin, syarat pertama amandemen, yaitu mendapatkan persetujuan parlemen, seakan telah didapatkan. Kemenangan di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah telah diraih. Dukungan dua pertiga suara dari kedua majelis, untuk mengamandemen sesuai pasal 96, telah didapatkan. Kini, Shinzo Abe dan partainya LDP, tinggal dihadapkan pada syarat kedua, yaitu mendapatkan persetujuan rakyat melalui referendum, untuk melakukan amandemen konstitusi.

Namun, sebagian besar masyarakat Jepang belum menginginkan perubahan fundamental dalam Konstitusi Jepang, malahan didominasi rasa khawatir. Keinginan Shinzo Abe untuk merevisi Pasal 9 konstitusi negara, yang mencela hak Jepang untuk berperang, mengganggu RRC dan Korea Selatan, yang menanggung beban agresi Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Keinginannya untuk merevisi konstitusi dan membangun kembali tentara reguler, bisa menggagalkan strategi ekonomi, dan meningkatkan sengketa di Laut Cina Timur. Amerika Serikat pun berharap, semangat nasionalis Shinzo Abe tidak

akan meluas ke hubungan internasional, seperti sengketa Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang.⁷⁹

Shinzo Abe sangat menyadari bahwa kesalahan dalam mengambil kebijakan amandemen konstitusi secara terburu-buru, akan berdampak fatal pada posisinya sebagai perdana menteri, dan dukungan rakyat terhadap partainya. Ia tak ingin mengulang kembali kesalahannya, dalam mengambil kebijakan keras, seperti periode sebelumnya. Baginya, pemerintahan stabil, ekonomi tumbuh, dan posisi aman, akan menjadi prioritas utama kepemimpinannya di tahun pertama sebagai perdana menteri Jepang.

Keamanan merupakan masalah pelik bagi Jepang. Di satu sisi, Jepang berusaha menjaga kedaulatan dan keamanan nasionalnya dari pengaruh luar. Di sisi lain, setiap gerakan-gerakan politik dan militer Jepang, selalu mendapatkan protes keras dan kritik dari negara-negara Asia, khususnya RRC dan Korea Selatan. Negara-negara Asia secara khusus, berhati-hati terhadap gerakan-gerakan politik dan militer Jepang. Hal ini pada dasarnya, karena dua alasan.

Pertama, negara-negara Asia telah mengalami penderitaan sangat besar, dari ekspansi militer Jepang selama Perang Dunia II. *Kedua*, Jepang enggan atau pun tidak mau, mengakui kerusakan yang disebabkan, terhadap masyarakat Asia, akibat ekspansi militernya tersebut.

Oleh karena itu, demonstrasi anti-Jepang dan protes di seluruh RRC dan Korea Selatan di tahun terakhir, lebih dari revisionisme sejarah Jepang, adalah bukti bahwa lebih dari enam puluh tahun setelah berakhirnya Perang Pasifik, luka-luka perang belum

⁷⁹ Shannon Mann. (2013). *Can Shinzo Abe Make Japan a Superpower Again?*
<http://www.policymic.com/articles/58137/can-shinzo-abe-make-japan-a-superpower-again>.
Diakses pada 3 September 2013, pukul 10.10 WITA.

sembuh, dan terus menjiwai hubungan Jepang, dengan negara-negara tetangganya di kawasan Asia Timur tersebut.

B. Penyelesaian Sengketa-sengketa Wilayah

1. Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku dengan RRC

Dalam satu tahun terakhir, hubungan bilateral Jepang-RRC mengalami ketegangan, terkait masalah sengketa teritorial di Laut Cina Timur. Gugus kepulauan yang oleh Jepang disebut Senkaku itu, diklaim oleh RRC sebagai bagian wilayah teritorialnya dengan nama kepulauan Diaoyu. RRC mengklaim kepulauan itu sebagai wilayahnya sejak zaman kerajaan, namun Jepang menegaskan bahwa mereka menguasai kepulauan itu pada akhir 1890, setelah memastikan kepulauan itu tak berpenghuni.

Pada September 2010, hubungan bilateral kedua negara sempat memanas, setelah Jepang menahan kapten kapal pencari ikan RRC, yang kedapatan beraktivitas di sekitar kepulauan Senkaku. Ketegangan RRC-Jepang meningkat, terutama setelah pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau di gugus kepulauan Senkaku dari seorang pemilik pribadi di Jepang, September 2012 lalu. Spontan, gelombang protes anti-Jepang pun membara di beberapa kota utama RRC. Akibatnya, aktivitas ekonomi Jepang di RRC lumpuh, serta mempengaruhi hubungan kerjasama ekonomi kedua negara.

Ketegangan antara Jepang dan RRC mempengaruhi neraca perdagangan kedua negara, yang ditaksir mencapai nilai US\$ 340 milyar. RRC adalah tujuan ekspor terbesar Jepang, sementara Jepang merupakan tujuan ekspor RRC di peringkat empat. Berdasarkan

data statistik bea cukai RRC, RRC mengekspor barang-barang dengan total nilai US\$ 148,3 milyar, dan mengimpor dari Jepang sebesar US\$ 194,6 milyar.⁸⁰

Hubungan yang tak harmonis dengan RRC, akibat perselisihan kepulauan Senkaku/Diaoyu, membebani permintaan perdagangan Jepang. Bahkan ketegangan dengan RRC, membuat boikot terjadi, dan permintaan barang Jepang ke RRC, merosot hingga 15,8 persen. Alhasil, permintaan barang dari Jepang terus tergelincir. Bahkan, pada Desember 2012, pengiriman barang dari Jepang, jeblok hingga 5,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.⁸¹

Tak hanya itu, kedua negara juga menggelar pengamanan laut di sekitar wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu, yang sedang disengketakan. Apa yang sedang terjadi di kepulauan ini? Dalam pandangan Awani Irewati, seorang peneliti Kajian Internasional di Pusat Penelitian Politik LIPI, ada tiga faktor yang menjadi pemicu.⁸²

Pertama, perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut Cina Timur antara Jepang dengan RRC, yang hingga kini belum dicapai kesepakatan bersama. Jepang mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya (berjarak 200 mil), sedangkan RRC mengacu pada kelanjutan alamiah dari landas kontinennya (berjarak di luar 200 mil).

Gambar 4. Peta Garis Perbatasan Wilayah Laut yang Disengketakan Kedua Negara

⁸⁰ Ella Syafputri. (2012). *Krisis China-Jepang Pertaruhkan Rp. 3.230 Triliun*. <http://www.antarane.ws.com/berita/333848/krisis-china-jepang-pertaruhkan-rp3230-triliun>. Diakses pada 4 Januari 2014, pukul 17.37 WITA.

⁸¹ Republika (ed.). (2013). *Rekor Defisit Neraca Perdagangan Jepang*. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/25/mh5r6p-rekor-defisit-neraca-perdagangan-jepang>. Diakses pada 4 Januari 2014, pukul 17.53 WITA.

⁸² Awani Irewati. "Senkaku, antara Jepang dan China." Kompas, 24 September 2012.



Sumber: Project 2049 Institute

Kedua, perbedaan persepsi sejarah kepemilikan Senkaku/Diaoyu di setiap pihak bermuara pada klaim berbeda. RRC yakin kepemilikan atas Diaoyu sejak Dinasti Ming (1368-1644), dimana namanya sudah tercantum dalam sebuah buku berjudul “*Departure Along the Wind*” (terbit 1403), yang menjadi bagian dari Taiwan. Pada saat kekalahan RRC dalam Perang Sino-Jepang (1894-1895), Taiwan dan termasuk kepulauan Diaoyu diserahkan ke Jepang. Namun, akhir Perang Dunia II, kepulauan ini dikembalikan oleh Amerika Serikat ke RRC, berdasarkan perjanjian “Tiga Besar”, antara Amerika Serikat, Inggris, dan RRC, di Kairo, Mesir.

Sementara Jepang, setelah kemenangannya dalam Perang Sino-Jepang, menerima penyerahan Senkaku dari RRC. Momentum inilah yang mengukuhkan secara resmi kepulauan Senkaku sebagai bagian teritorial Jepang. Berdasarkan keputusan Kabinet pada 14 Januari 1895, kepulauan ini dimasukkan ke dalam teritorial Jepang. Sejak itu, Senkaku menjadi bagian integral dari kepulauan Nansei Shoto, dimana ini diyakini

tidak menjadi bagian dari Taiwan ataupun lainnya, yang diserahkan ke RRC setelah Perang Dunia II. Hal ini kemudian diperjelas oleh sebuah peta 1969 buatan RRC yang berlabel “*Confidential*” memasukkan kepulauan Senkaku ke wilayah Jepang. Ini berarti, ada pengakuan resmi RRC sejak itu, bahwa Senkaku masuk dalam wilayah otoritas Jepang.

Ketiga, munculnya sengketa ini dipicu setelah kedua pihak menyadari adanya sumber cadangan minyak dan gas alam di sekitar kepulauan Senkaku/Diaoyu pada pertengahan 1990-an yang berlanjut hingga kini. Ketika kepentingan nasional dipicu kepentingan energi prospektif, segala daya penguat dan bukti pembenaran akan dihimpun demi basis legal untuk penguasaan sumber energi tersebut.

Dengan latar belakang tiga faktor di atas, kemarahan rakyat RRC dengan membakar bendera Jepang, menyerang kantor perwakilan Jepang, dan yang menyebabkan banyak perusahaan besar Jepang di RRC ditutup, sesungguhnya hanyalah emosi sentimen nasionalisme. Hal ini diperjelas dengan aksi protes anti-Jepang yang bertepatan “*Manchuria Incident*”, dimana pada 18 September 1931, terjadi invasi militer Jepang ke wilayah utara RRC, dipakai sebagai momen yang mengantar emosi rakyat RRC terhadap Jepang.

Bila mengacu pada hukum internasional, posisi Jepang terhadap kepulauan Senkaku sudah benar. Jepang memasukkan kepulauan ini ke dalam teritorialnya pada Januari 1895. Sejak itu, survei atas kepulauan ini dilakukan Jepang, dan diyakini bahwa kepulauan tersebut tidak berpenghuni (asas *terra nullius* atau *no man's land*). Survei saat

itu menunjukkan tiadanya tanda-tanda bahwa kepulauan Senkaku berada di bawah kontrol RRC.⁸³

Guna memperjuangkan hak kedaulatan di wilayah teritorial kepulauan Senkaku, Jepang tampak bersikap konfrontatif, dengan menerapkan kebijakan garis keras melalui konfrontasi militer. Kebijakan ini dapat diamati dari tindakan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang memerintahkan Menteri Pertahanan Itsunori Onodera untuk memperkuat penjagaan di sekitar kepulauan yang disengketakan dengan RRC di Laut Cina Timur.⁸⁴

Bagi Jepang, kepulauan yang disengketakan dengan RRC ini, memiliki posisi geografis yang strategis, utamanya dalam hal strategi militer. Dalam pandangan Daisaku Sakaguchi, seorang ahli strategi militer pada *National Defense Academy*, Tokyo, memaparkan bahwa letak kepulauan Senkaku yang berada diantara pulau Taiwan dan kepulauan Okinawa, memiliki geostrategis dalam operasi militer, seperti pengumpulan informasi, komando, dan kontrol, mobilisasi tentara, mengamankan pengisian lanjutan, serta perlindungan, dan evakuasi warga.⁸⁵ Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama Jepang, mempertahankan kepulauan di lepas pantai tak berpenghuni itu, sebagai bagian dari teritorial Jepang. Pemerintahan Shinzo Abe tentu sadar betul, akan arti penting kepemilikan kepulauan ini, dalam tinjauan militer, apabila suatu waktu, Perang Asia Timur kembali bergolak.

⁸³ Shinya Murase. (2013). *The Senkaku Islands and International Law*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies / Japan Chair. Hal 1.

⁸⁴ Kompas (ed.). "PM Abe: Perkuat Penjagaan". Kompas, 9 Januari 2013. Hal. 10.

⁸⁵ Daisaku Sakaguchi. (2011). *Distance and Military Operations: Theoretical Background toward Strengthening the Defense of Offshore Islands*. Tokyo: National Institute for Defense Studies (NIDS). NIDS Journal of Defense and Security, Nomor 12, Desember 2011. Hal. 105.

Dalam hubungan Jepang-RRC terkait penyelesaian sengketa kepulauan Senkaku, Shinzo Abe menegaskan, bahwa tak ada ruang negosiasi dengan RRC, terkait kepulauan Senkaku, karena kepulauan itu bagian inheren dari Jepang. Shinzo Abe dengan tegas mengatakan, bahwa Jepang tak akan mundur setapak pun, untuk mempertahankannya. Jepang bahkan mengerahkan kekuatan militernya, dengan menerbangkan jet-jet tempur F-15 ke wilayah kepulauan tersebut untuk mengusir pesawat dan kapal RRC.

RRC sejak itu pun meningkatkan patroli-patroli maritim dan udara di wilayah Laut Cina Timur. Baik Jepang maupun RRC masing-masing mengerahkan jet-jet tempur, dan kapal-kapal perang, meskipun tidak terjadi bentrokan. Dalam menyelesaikan sengketa kepulauan Senkaku, pemerintah Jepang menegaskan tak akan menempuh jalur diplomasi dengan RRC. Karenanya, pihak RRC memilih jalur diplomasi melalui PBB. Hal ini dapat dilihat dari keputusan RRC membawa sengketa klaim tumpang tindih kepulauan Diaoyu, dengan memberi laporan rinci kepada PBB.

Dalam pandangan Rene L. Pattiradjawane, ada beberapa faktor yang mendorong pemerintah RRC melakukan internasionalisasi klaim tumpang tindih kedaulatannya dengan Jepang.⁸⁶ *Pertama*, terganggunya hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan RRC-Jepang yang merugikan kedua negara. *Kedua*, internasionalisasi sengketa Diaoyu/Senkaku oleh RRC mencerminkan adanya pendapat para pengambil keputusan dan ahli strategi RRC, tentang semakin terbukanya ancaman konflik langsung yang melibatkan kekuatan militer masing-masing negara. *Ketiga*, sejak terjadi eskalasi dalam klaim kedaulatan ini, sejumlah pertemuan kedua pihak seperti menemui jalan buntu.

⁸⁶ Rene L. Pattiradjawane. "Membunuh Ayam, Menakuti Monyet." Kompas, 19 Desember 2012. Hal. 10.

Pengajuan laporan RRC ke PBB tentang eksistensi yurisdiksi di kepulauan kosong di laut lepas, yang diperebutkan dengan Jepang, memang tidak akan memberikan dampak langsung perubahan status kepemilikan kepulauan tersebut. Langkah internasionalisasi ini menjadi bagian penting untuk meredam terjadinya konflik terbuka, serta kesalahpahaman yang muncul di wilayah-wilayah sengketa, akibat persinggungan kekuatan militer antarnegara.

Konfrontasi yang terjadi antara Tokyo dan Beijing bukan hanya tentang kepemilikan pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, namun juga yang terutama didorong oleh perasaan nasionalisme.⁸⁷ Bibit-bibit nasionalisme di Jepang dan RRC, sepertinya berhasil mendorong agendanya sendiri, ketimbang mengarahkan ketegangan dan meyakinkan publik masing-masing pihak, bahwa konfrontasi akan merugikan semua pihak. Ini tampak jelas, pada unjuk rasa anti-Jepang di RRC. Sementara para penguasa di Jepang pun, terjebak pada pendapat umum dalam memandang kebangkitan RRC sebagai ancaman nyata di Asia. Emosi sentimen nasionalisme akibat konflik klaim tumpang tindih di Laut Cina Timur, menjadi titik api yang bisa menyulut kembali perang di Asia Timur. Alasannya sederhana, sentimen nasionalisme dalam sejarah dunia, menjadi dasar pemicu paling cepat terjadinya konflik yang mengakibatkan banyak korban.

Sengketa teritorial ini menjadi polemik tersendiri bagi penguasa di Tokyo maupun Beijing. Mereka tidak bisa menahan emosi nasionalistik yang mencuat karena perspektif sejarah masa lalu. Akibatnya, masing-masing pihak tidak memiliki strategi untuk keluar dari ancaman konflik terbuka, karena tidak mau terlihat memiliki kelemahan,

⁸⁷ Tetsuo Kotani. (2013). *The Senkaku Islands and the US-Japan Alliance: Future Implications for the Asia-Pacific*. Tokyo: Project 2049 Institute. Hal. 1.

yang bisa menguntungkan pihak lawan. Jalan akhir sengketa ini belum berada di tangan Jepang maupun RRC.

Persoalan yang dihadapi RRC dan Jepang dalam penyelesaian sengketa kepulauan ini memang menjadi lebih berat. Perilaku dan keputusan strategis RRC atas kepulauan Diaoyu, bisa memberikan dampak luas atas klaim tumpang tindih lainnya di Laut Cina Selatan, dengan beberapa negara Asia Tenggara. Begitupun dengan Jepang, klaim kepemilikan kepulauan Senkaku, di satu sisi, menjadi semacam uji kasus bagi Jepang, atas penyelesaian sengketa teritorial lainnya, seperti kepulauan Takeshima dengan Korea Selatan, dan kepulauan Kurile dengan Rusia.

2. Penyelesaian Sengketa Kepulauan Takeshima dengan Korea Selatan

Korea Selatan memiliki permasalahan dengan Jepang mengenai kepulauan Dokdo, yang oleh Jepang disebut Takeshima. Jepang mencaplok kepulauan ini saat Perang Rusia-Jepang pada 1904, dan pada Januari 1905, kepulauan ini dimasukkan ke dalam wilayah teritorial Jepang dengan nama Takeshima, di bawah yurisdiksi Okinoshima, bagian teritorial administrasi Shimane Prefecture.⁸⁸ Kepemilikan atas kepulauan ini berlanjut saat penaklukan Semenanjung Korea pada 1910-1945. Korea Selatan berpendapat bahwa Jepang jangan memaksakan klaim atas Dokdo, karena itu merupakan hasil pencaplokan masa imperiumnya.

Hubungan Korea Selatan-Jepang berubah dingin awal tahun 2012, ketika perdebatan kepulauan Dokdo/Takeshima yang disengketakan kedua negara memanas.

⁸⁸ Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2008). *10 Issues of Takeshima*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan. Hal. 8.

Masalah sengketa teritorial berubah menjadi konfrontasi untuk menyikapi sejarah masa lalu. Korea Selatan menuduh Jepang, karena tidak cukup merasa menyesal atas perilakunya selama perang.

Kekesalan Korea Selatan semakin diperparah oleh kunjungan pejabat tinggi Jepang ke Kuil Yasukuni. Pada 23 April 2013, sebanyak 168 anggota Parlemen Jepang dari partai konservatif mengunjungi Kuil simbol agresi militer Jepang tersebut.⁸⁹ Korea Selatan pun memprotes keras aksi tersebut. Bagi Korea Selatan, kunjungan ke Kuil Yasukuni berarti membuka kembali luka lama agresi militer Jepang selama Perang Dunia II. Kondisi ini akan sulit bagi Korea Selatan untuk membangun hubungan dengan Jepang.

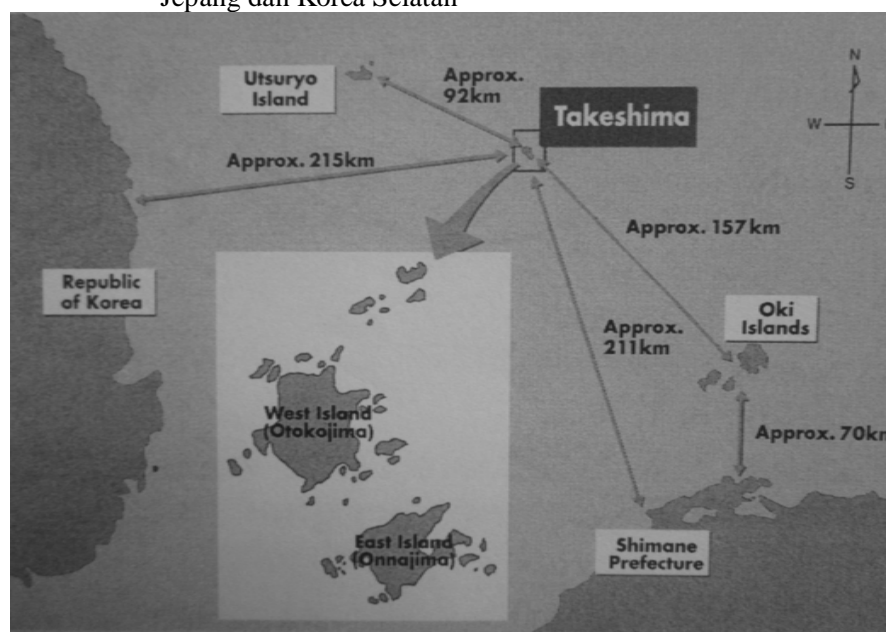
Korea Selatan selalu memprotes kunjungan ke kuil itu, karena dianggap sebagai glorifikasi masa lalu Jepang, yang telah menyengsarakan negara-negara tetangganya. Kunjungan petinggi Jepang tersebut, merupakan bentuk pemberian penghormatan pada semangat militeristis Jepang, dan hal itu, membangkitkan kembali ingatan akan kekerasan yang dilakukan Jepang terhadap mereka di masa lalu. Apalagi, diantara 2,5 juta orang Jepang yang tewas itu, terdapat 14 orang yang dinyatakan sebagai penjahat perang pada era Perang Pasifik.

Di tengah memanasnya situasi akibat kunjungan ke Kuil Yasukuni, pemerintah Korea Selatan kembali melontarkan pernyataan keras kepada Jepang, terkait rencana amandemen Konstitusi Pasifik Jepang. Korea Selatan menyebut rencana tersebut, sebagai aksi provokatif yang tak akan mengubah pendirian Korea Selatan, untuk mempertahankan

⁸⁹ Kompas (ed.) "*Korsel Khawatir Jepang Terlalu ke Kanan.*" Kompas, 25 April 2013. Hal. 11.

klaim atas wilayah Dokdo. Korea Selatan dan Jepang kini sedang terbelit sengketa teritorial atas kepulauan Dokdo/Takeshima di Laut Jepang.

Gambar 5. Peta Kepulauan Takeshima/Dokdo yang Disengketakan Jepang dan Korea Selatan



Sumber: Ministry of Foreign Affairs of Japan

Keberanian Korea Selatan tersebut disuarakan pada saat Korea Selatan sesungguhnya memerlukan dukungan Jepang, dalam menghadapi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara. Apabila hubungan antara Jepang dan Korea Selatan terganggu, maka kerjasama kedua negara sekutu Amerika Serikat di Asia Timur tersebut, dalam menghadapi Korea Utara pun akan terganggu. Dalam kaitan itulah, Jepang harus berhati-hati memberikan penghormatan kepada para pahlawannya, yang dianggap sebagai penjahat perang oleh Korea Selatan dan juga RRC.

Dalam upaya meredakan ketegangan, dan menyelesaikan sengketa wilayah atas kepulauan Takeshima, yang oleh Korea Selatan dinamai Dokdo, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengirim utusan khusus ke Seoul, untuk bertemu Presiden Korea Selatan

Park Geun-hye. Shinzo Abe mengutus seorang pejabat senior dari Partai LDP, untuk menyampaikan surat kepada Park Geun-hye. Menurut media, utusan tersebut bernama Fukushima Nukaga, seorang anggota senior dari Liga Anggota Parlemen Korea Selatan-Jepang, yang memiliki hubungan dengan tokoh senior di Seoul.⁹⁰

Isu Takeshima ini tidak banyak melibatkan konfrontasi militer antar kedua negara, bila dibandingkan dengan sengketa Senkaku. Sehingga, perundingan dalam upaya meredakan ketegangan antar kedua negara, ditempuh melalui jalur diplomasi. Ketegangan yang terjadi, lebih didasarkan pada emosi sentimen nasionalisme. Perubahan kepemimpinan, dan reorientasi kebijakan politik luar negeri, dan pertahanan Jepang, yang mengarah kepada indikasi kebangkitan kembali militerisme Jepang, membuat Korea Selatan merasa khawatir.

Namun, hubungan diplomasi antar kedua negara dalam mengelola permasalahan diplomatik dan sejarah masa lalu, senantiasa ditempuh dengan jalan damai, dan menjaga hubungan baik dua negara tetangga di Asia Timur tersebut.⁹¹ Akhir penyelesaian sengketa ini belum menemui titik temu. Namun, permasalahan ini akan menemukan jalan akhir, bilamana Jepang melakukannya dengan cara yang didasarkan pada pertimbangan liberal-internasionalis, dan tidak nasionalis, bersikap transparan dalam kebijakan pertahanannya, mengakui kerusakan yang disebabkan Jepang terhadap masyarakat Korea Selatan, akibat ekspansi militernya selama Perang Dunia, serta peka terhadap permasalahan dari negara tetangganya, Korea Selatan.

⁹⁰ Dyah Ratna Meta Novi. “*Jepang Ingin Perbaiki Hubungan dengan Korea*”. *Republika*, 21 Desember 2012.

⁹¹ Hosup Kim. (2011). *The Role of Political Leadership in the Formation of Korea-Japan Relations in the Post-Cold War Era*. *Asian Perspective*, 35 (1).
<http://search.proquest.com/docview/867056198?accountid=39870>. Hal. 14.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Kebijakan politik luar negeri Jepang di Asia Timur merupakan tindakan Jepang, dalam memaknai kondisi di lingkungan eksternalnya, yang memberikan kekhawatiran bagi keamanan nasionalnya, serta kondisi domestik, yang menginginkan keterlibatan Jepang, dalam merespon krisis keamanan di kawasan Asia Timur. Kebijakan pemerintah Jepang, khususnya di bawah pemerintahan Shinzo Abe, merupakan tindakan dalam memaknai dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Timur, yang menitikberatkan pada aspek peningkatan kapabilitas pertahanan dalam menjaga keamanan nasional Jepang, serta penyelesaian sengketa-sengketa wilayah kedaulatan di perairan laut lepas, dengan RRC dan Korea Selatan.
2. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang, pemerintahan Shinzo Abe mengambil kebijakan menaikkan anggaran pertahanan Jepang, mengembangkan industri pertahanan, mengembangkan sistem pertahanan senjata balistik, memperkuat postur pertahanan di kepulauan barat daya, mempertahankan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat, serta menjalin kerjasama pertahanan berlapis dengan negara-negara Asia-Pasifik. Dalam menyelesaikan masalah sengketa kepulauan Senkaku, pemerintahan Shinzo Abe lebih menempuh kebijakan garis keras melalui konfrontasi militer dengan RRC,

sedangkan penyelesaian sengketa kepulauan Takeshima ditempuh melalui jalur diplomasi dengan Korea Selatan.

B. Saran-saran

1. Jepang diharapkan memberikan kontribusi yang penting bagi dunia, dalam kebijakan politik luar negerinya. Jepang perlu meminimalkan peran-peran politik, dan militernya, karena negara-negara Asia secara khusus, menaruh kewaspadaan terhadap ambisi-ambisi politik, dan militer Jepang. Jepang akan mendapat banyak manfaat, bila memaksimalkan peran-peran ekonomi, dan diplomatiknya, supaya dapat membuat kontribusi-kontribusi yang penting, bagi pembangunan ekonomi dunia secara umum, dan kawasan Asia Timur secara khusus.
2. Jepang perlu terus membangun saling percaya dengan negara-negara tetangganya di Asia Timur, dengan melakukan transparansi tentang kebijakan pertahanannya, menyangkut isu-isu keamanan kawasan. Selain itu, pemerintah Jepang, RRC, dan Korea Selatan, semestinya bisa menepikan emosi sentimen nasionalisme. Emosi sentimen nasionalisme akibat konflik klaim tumpang tindih kepulauan di laut lepas, menjadi titik api yang bisa menyulut kembali perang di Asia Timur. Sentimen nasionalisme dalam sejarah dunia, menjadi dasar pemicu paling cepat terjadinya konflik, yang menyebabkan banyak korban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU

- Amstutz, Mark R. (1995). *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque: Brown & Benchmark.
- Cantori, Louis J. & Steven Speigel. (1970). *The International politics of Regions: A Comparative Approach*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Coulombis, Theodore A. & James H. Wolfe. (1986). *Introduction to International Relations, Power and Justice. Third Edition*. Longman Inc.
- Djafar, Zainuddin. (1996). *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Dongxiao, Chen. (2003). *The Constructivist Challenge to the Debate on East Asian Security in the New Century*. Dalam David W. Lovell. *Asia-Pacific Security: Policy Challenges*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
- Frankel, J. (1990). *Hubungan Internasional*. Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara.
- Frankel, J. (1991). *Hubungan Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Holsti, K.J. (1987). *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Jemadu, Aleksius. (2008). *Politik Global Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones, Walter S. (1993). *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional dan Tatanan Dunia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Joshi, Sanjana. (2005). "Japan and Asia", dalam Mahavir Singh (ed.). *Building A New Asia*. New Delhi: Shipra Publications.
- Kotani, Tetsuo. (2013). *The Senkaku Islands and the US-Japan Alliance: Future Implications for the Asia-Pacific*. Tokyo: Project 2049 Institute.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2008). *10 Issues of Takeshima*. Tokyo: Ministry of Foreign Affairs of Japan.

- Nye, Joseph S. (1992). *Memimpin Dunia: Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Plano, Jack C. & Roy Otton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Perwita, Anak Agung Banyu & Yanyan Mochammad Yani. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rudy, T. May. (2002). *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Refika Aditama.
- S, Nuraeni, Deasy Silvy & Arfin Sudirman. (2010). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Shambaugh, David. (2005). "The Rise of China and Asia's New Dynamics". Dalam David Shambaugh (ed.). *Power Shift: China and Asia's New Dynamics*. Berkeley: University of California Press.
- Sing, Lim Hua. (2001). *Peranan Jepang di Asia, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sudira, I Nyoman. (1999). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- The National Institute for Defense Studies (ed.). (2013). *East Asian Strategic Review 2013*. Tokyo : The Japan Times.

B. JURNAL

- Akira, Kojima. (2009). *Japan as Number Three*. Japan Echo, Volume 36, Nomor 6, Desember 2009.
- Andhika P, Wendy. (2008). *Amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang: Mungkinkah Berhasil Dilakukan?*. Hubungan Internasional, Volume IV Nomor 1.
- Kim, Hosup. (2011). *The Role of Political Leadership in the Formation of Korea-Japan Relations in the Post-Cold War Era*. Asian Perspective, 35 (1).
<http://search.proquest.com/docview/867056198?accountid=39870>.

- Masaki, Taniguchi, Uenohara Hideaki & Sakaiya Shiro. (2010). *Who Ended the LDP's Reign?* Japan Echo, Volume 37, Nomor 1, Februari 2010.
- Murase, Shinya. (2013). *The Senkaku Islands and International Law*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies / Japan Chair.
- Perwita, Anak Agung Banyu. (2007). *Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik*. Jakarta: Analisis CSIS, Volume 36, Nomor 1, Maret 2007.
- Sakaguchi, Daisaku. (2011). *Distance and Military Operations: Theoretical Background toward Strengthening the Defense of Offshore Islands*. Tokyo: National Institute for Defense Studies (NIDS). NIDS Journal of Defense and Security, Nomor 12, Desember 2011.
- Sukma, Rizal. (2007). *Indonesia, ASEAN dan Tatanan Regional Asia Timur*. Jurnal Luar Negeri, Volume 24, Nomor 3, September-Desember 2007. Jakarta: BPPK Kemlu RI.
- Tang, Siew-Mun. (2007). *Japan's Security Renaissance: Evolution or Revolution?* Journal of International and Area Studies, Volume 14 Nomor 1. Seoul: Seoul National University Press.

C. MEDIA CETAK

- Bhakti, Ikrar Nusa. "Asia Timur Setelah Pemilu Jepang." Kompas, 5 Januari 2013.
- Irewati, Awani. "Senkaku, antara Jepang dan China." Kompas, 24 September 2012.
- Kompas (ed.). "Sengketa Wilayah: Delapan F-15 Jepang Cegat Pesawat China." Kompas. 14 Desember 2012.
- Kompas (ed.). "Abe: Tak Ada Ruang Negosiasi." Kompas, 18 Desember 2012.
- Kompas (ed.). "PM Abe Umumkan Kabinet". Kompas, 27 Desember 2012.
- Kompas (ed.). "Jepang Akan Tambah Anggaran Pertahanan." Kompas, 7 Januari 2013.
- Kompas (ed.). "PM Abe: Perkuat Penjagaan". Kompas, 9 Januari 2013.
- Kompas (ed.). "Jepang Menambah Tentara, China Uji Coba Pesawat". Kompas, 29 Januari 2013.

- Kompas (ed.) “*Korsel Khawatir Jepang Terlalu ke Kanan.*” Kompas, 25 April 2013.
- Kompas (ed.). “*Jepang Jual Pesawat Militer.*” Kompas, 28 Mei 2013.
- Novi, Dyah Ratna Meta. “*Jepang Ingin Perbaiki Hubungan dengan Korea*”. Republika, 21 Desember 2012.
- Pattiradjawane, Rene L. “*Roket Korut dan Perubahan Radikal di Asia.*” Kompas, 15 Desember 2012.
- Pattiradjawane, Rene L. “*Membunuh Ayam, Menakuti Monyet.*” Kompas, 19 Desember 2012.
- The Jakarta Post (ed.). “*Japan to Boost Military Headcount Amid China Island Dispute*”. The Jakarta Post, 28 Januari 2013.

D. INTERNET

- Clark, Stephen. (2013). *Japan Launches Spy Satellites Into Orbit*.
<http://www.space.com/19503-japan-spy-satellites-launch.html>. Diakses pada 15 November 2013, pukul 09.05 WITA.
- Dw (ed.). (2013). *Japan Launches New Spy Satellite*. <http://www.dw.de/japan-launches-new-spy-satellite/a-16553451>. Diakses pada 15 November 2013, pukul 09.04 WITA.
- Fackler, Martin. (2012). *Ex-Premier is Chosen to Govern Japan Again*.
http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html?_r=0. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.39 WITA.
- Hardoko, Ervan. (2012). *AS dan Jepang Latihan Perang di Perairan Sengketa*.
<http://nasional.kompas.com/read/2012/11/05/18071157/AS.dan.Jepang.Latihan.Perang.di.Perairan.Sengketa>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.21 WITA.
- Jain, Purnendra. (2013). *Japan After Electoral Success, Now Comes the Hard Part of Abe*. <http://www.eastasiaforum.org/2013/07/25/japan-after-electoral-success-now-comes-the-hard-part-for-abe/>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 13.13 WITA.

- Kompas.com (ed.). (2012). *LDP Diprediksi Menang*.
<http://internasional.kompas.com/read/2012/12/07/02243733/LDP.Diprediksi.Menang>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2013, pukul 13.32 WITA.
- Mann, Shannon. (2013). *Can Shinzo Abe Make Japan a Superpower Again?*
<http://www.policymic.com/articles/58137/can-shinzo-abe-make-japan-a-superpower-again> 10.10. Diakses pada tanggal 3 September 2013, pukul 10.10 WITA.
- Mulgan, Aurelia George. (2012). *What an Abe Prime Ministership Would Mean for Japan*. <http://www.eastasiaforum.org/2012/10/01/what-an-abe-prime-ministership-would-mean-for-japan/>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.32 WITA.
- Novi, Dyah Ratna Meta. (2012). *Jepang ingin Perbaiki Hubungan dengan Korea*.
<http://www.republik.co.id/berita/internasional/global/12/12/21/mfdh6a-jepang-ingin-perbaiki-hubungan-dengan-korea>. Diakses pada tanggal 21 April 2013, pukul 11.49 WITA.
- Oshima, Takashi, dkk. (2013). *Analisis: Jepang Berusaha Sikap Keras, AS Mendorong Kerjasama Dalam Berurusan dengan Cina*. Asahi Shimbun, 4 Oktober 2013.
- Republika (ed.). (2013). *Rekor Defisit Neraca Perdagangan Jepang*.
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/25/mh5r6p-rekor-defisit-neraca-perdagangan-jepang>. Diakses pada 4 Januari 2014, pukul 17.53 WITA.
- Smith, Sheila A. (2013). *Japan, China and the Tide of Nationalism*.
<http://www.cfr.org/asia/japan-china-tide-nationalism/p29080>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 16.30 WITA.
- Streltsov, Dmitry. (2013). *Abe's Changing Security Policy*.
<http://www.eastasiaforum.org/2013/07/19/abes-changing-security-policy/>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 12.47 WITA.
- Swenson-Wright, John. (2013). *Viewpoint: What Upper House Victory Means for Shinzo Abe*. <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23401469>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 13.01 WITA.
- Syafputri, Ella. (2012). *Krisis China-Jepang Pertaruhkan Rp. 3.230 Triliun*.
<http://www.antaraneews.com/berita/333848/krisis-china-jepang-pertaruhkan-rp3230-triliun>. Diakses pada 4 Januari 2014, pukul 17.37 WITA.

Trinidad, Dennis D. (2013). *Abe's ASEAN Tour*.

<http://www.eastasiaforum.org/2013/09/06/abes-asean-tour/>. Diakses pada 27 November 2013, pukul 12.51 WITA.